

Rakyat Merdeka

Klik website: <http://www.rakyatmerdeka.co.id>

JUMAT, 25 FEBRUARI 2011

■ REDAKSI: 021-5369967 (EXT 727) FAKS: 021-53671716 ■ LAYANAN IKLAN: FAX: 021-5333156 ■ SERVIS PELANGGAN: 021-53674444

RP 3.900 (LUAR P. JAWA RP 3.800)

Di Dewan Pers, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku senang persolannya dengan TVOne sudah "jali-jali" alias selesai sampai di sini. Sementara di Kantor PWI Pusat, wartawan senior Rosihan Anwar mengatakan, pernyataan Dipo tentang pers tak perlu dipedulikan. "Biar saja dia mau bicara apa. Kurang kerjaananggapi dia," katanya.

MENURUT Rosihan, orang bebas mengkritik pers asal tidak mengganggu. "Nah, itu masalahnya. Menurut saya, pernyataan Dipo sudah mengganggu, karena ada ancaman boikot. Kalau cuma mengkritik, silakan," kata Sabam Siagian, wartawan senior yang juga hadir di PWI.

Mereka berdua, Rosihan dan Sabam berkumpul di kantor PWI dengan sejumlah tokoh pers nasional, antara lain Fikri Jufri, Djafar Assegaf, Arswendo Atmowiloto dan Marah Sakti Siregar.

■ BERSAMBUNG KE HAL 9

Anas Minta Golkar & PKS Keluar Koalisi

SAKING jengkelnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang biasanya bicara lembut, kali ini bicara keras. Anas terangsang meminta mitra koalisi yang sudah tidak nyaman di Setiabudi untuk memilih jalan sendiri. "Kita berharap betul, koalisi dibangun dengan cita-cita yang baik, sungguh-sungguh. Yang nyata-nyata tidak sungguh-sungguh silakan pilih jalan lain, biar sama-sama enak," tegas Anas kepada

■ BERSAMBUNG KE HAL 9

Kelakar Rakyat

■ Golkar: Nasib Golkar dan koalisi kita tunggu 1-2 minggu ini

Kaya lagu Krisdayanti, "menghitung hari..."

Vox Populi

■ Catatan: Budi Rahman Hakim

brih.journalist@yahoo.com

Menyoal Boikot



KEJENGKELAN Sekretaris Kabinet Dipo Alam barangkali sudah menyundul ubun-ubun. Tak tahan pemerintahan yang dipimpin bosnya, SBY, diajuka-juka utamanyanya oleh dua televisi swasta dan satu surat kabar nasional. Bekas aktivis mahasiswa penentang Orde Baru itu, akhirnya menumpahkan kekesalan dengan mengajak rakyat agar berhenti menonton, apalagi percaya dengan kebenaran isi berita yang diayakikan ketiga media tersebut. Sebagai tipikal cadangan kesabaran seorang Dipo, alaiu, jangan-jangan sinyalnya benar.

Bagi politisi dari kubu kontra koalisi pemerintah yang resmi maupun pembelot, pernyataan seorang dari lingkaran Istana ini, tentu merupakan santapan empuk. Ajakan berbau provokasi bernada kontra demokrasi ini bisa menjadi amunisi baru untuk mendongker habis pemerintahan dan seluruh partai penyangganya kalau perlu sampai knock out. Ini seperti durian runtuh saja, diserbui sampai habis. Sepuas-puasnya. Kaum oposisi bahkan berterima kasih dengan nyinyir atas kecerobohan itu.

Pernyataan Dipo sebagai mantan penentang rezim pemerintah yang membungkam kebebasan informasi dan kemerdekaan pers jujur saja amat mengesankan. Selama menjadi Sekkab, Dipo tidak pernah menampilkan satu kali pun kegarangannya sebagai bekas pendemo. Cenderung diam dan jauh di belakang bayang-bayang seorang Menseseng sekalipun bahkan tampil seperti nice boy. Dalam sebulan terakhir ia seperti tak kuasa menampik watak aslinya.

Banyak kalangan menilai langkah Dipo ini sebagai blunder besar, kontraproduktif, dan sekaligus dapat menjadi alasan meneruskan

■ BERSAMBUNG KE HAL 9

Gossip Jalanan

Petinggi Demokrat Incar Kursi Menteri PKS

Saorang petinggi Partai Demokrat dikabarkan terus bergeligi agar reshuffle segera dilakukan. Soalnya, dia berharap bisa ditempatkan di salah satu kementerian yang kini dipegang menteri asal PKS. ■

Tidak Menyerah Ke MetroTV & Media Indonesia

Dipo Vs TVOne Sudah Jali-jali



■ Dipo Alam



Kunci Kantor PSSI Di Kantor Menpora

DIANTAR RIBUAN DEMONSTRAN

RIUH rendah demonstrasi di kantor PSSI Senayan, Jakarta, terus berlangsung.

Aksi di kantor PSSI dimulai sejak pukul 12.00 WIB. Adaribuan orang berkaos merah sambil membawa atribut tim daerah masing-masing ngendruk ke Pintu X Gelora Bung Karno. Selain itu, juga banyak sekali spanduk dan poster serta sebuah replika tikus seukuran orang dewasa. Replika yang ditempel gambar-gambar Nurdin Halid itu dibawa dengan tandu.

Pengamanan kantor PSSI kemarin lebih ketat dari sebelumnya. Selain personel polisi, juga ada ratusan anggota Brimob bersenjata laras panjang dan membawa tameng.

Massa datang sambil meneriakkan

yel-yel dengan semangat. Mereka mengseks ke halaman kantor PSSI. Mereka bematik mengembok ulang kantor itu lagi. Segel dan gembok yang dua hari lalu dipasang massa, rupanya ada yang mencopet. Polisi sempat menghadang mereka. Namun setelah negosiasi, akhirnya mereka diizinkan melakukan pengembokan.

"Kita sudah menenggel lagi kantor PSSI. Kita sudah menduduki lagi PSSI," teriak Sangap Surbakti, koordinator aksi, usai menyaksikan empat demonstran menenggel pintu dengan rantai besi dan gembok besar. Sorak sorai pun bergema. Nyanyian dan yel-yel terus diteriakkan.

■ BERSAMBUNG KE HAL 9

Menolak Angket = Lindungi Mafia Pajak

GOLKAR MINTA MAAF PERJUANGAN BELUM BERHASIL

PARTAI-partai yang menolak hak angket pajak bisa dianggap melindungi mafia pajak. Itulah rangkuman hasil wawancara dengan sejumlah tokoh, kemarin, menanggapi kegagalan pembentukan Pansus Mafia Perpajakan di DPR, dalam voting beberapa hari lalu.

Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim bahkan merasa malu dengan sikap partainya yang menolak angket pajak dalam rapat paripurna DPR.

"Sekarang ini masyarakat menuntut, partai yang menolak angket seperti melindungi mafia pajak. Apakah ini nggak dipikirkan pimpinan Fraksi PPP. Saya malu banget saat dianya nasihat ini di akar rumput. Mungkin saja tuduhan itu tidak benar," kata Lukman Hakim.



■ Idrus Marham

"Kami meminta maaf, karena perjuangan kali ini belum berhasil"

Dalam proses voting di DPR, Selasa lalu, sikap Demokrat yang menolak pembentukan Pansus Mafia

Pajak didukung oleh PKB, PAN, PPP dan Gerindra dengan total 266 suara. Hanya selisih dua saja (264 suara) dengan sikap Golkar yang disokong PKS, PDIP dan Hanura.

Partai beringin bersikap merendah dengan kekalannya. Sejen Golkar Idrus Marham menyatakan berterimakasih kepada masyarakat dan partai yang telah ikut mendukung hak angket mafia perpajakan. "Namun kami meminta maaf, karena perjuangan kali ini belum berhasil," katanya, kemarin.

Idrus mengatakan, partainya belajar menghormati dan menghargai proses politik. Meskipun kalah, perjuangan Golkar untuk membongkar mafia pajak tak akan berhenti. "Ini

■ BERSAMBUNG KE HAL 9

NGANTOR LAGI DI MABES POLRI

Susno Salah Masuk Mobil Kabareskrim

SETELAH lepas dari tahanan Makot Brimob, Komjen Susno Duadji malah melontar aktivitas seperti biasanya. Kemarin pagi, Susno ngantor lagi di Mabes Polri dengan jabatan baru sebagai koordinator staf ahli Kapolri.

Kembali ke kantor tentu menyenangkan bagi Jenderal bintang tiga yang dijera kasus suap PT SAL dan korupsi dana Pilkada Jawa Barat itu. Saking semangatnya ngantor, Susno

sampai salah masuk mobil.

Saat meninggalkan kantor Bareskrim Mabes Polri, Susno nyaris masuk ke mobil dinas Kabareskrim Komjen Pol Tito Sumardi. Gara-garanya, Susno tak terlalu fokus dengan letak mobilnya karena dicecer pertanyaan belasan wartawan di pintu belakang Bareskrim.

■ BERSAMBUNG KE HAL 9

JENDERAL BHD DATANG KE SENAYAN

Kasus Gayus Akan Dibuktikan Terbalik

WAPRES Boediono bikin terobosan menjangkit dalam kasus Gayus Tambunan. Dia menginstruksikan agar kasus ini dituntaskan dengan cara pembuktian terbalik. Gayus akan diminta menjelaskan, dari mana nasihat ini di akar rumput. Mungkin saja tuduhan itu tidak benar," kata Lukman Hakim.

Instruksi itu diberikan Wapres kepada kepolitan dan kejaksaan dalam

rapat koordinasi kedua pelaksanaan Inpres Nomor 1/2011 di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Hadir dalam rapat itu Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arif, Kemendiknas Patrisia Akbar dan Kemendikau Agus Martowirdjo.

Pertu diketahui, Inpres Nomor 1 Tahun 2011 ini menyasar memandatkan kepada Wakil Presiden untuk mem-

percepat penanganan kasus mafia hukum, mafia pajak dan Bank Century. Dalam hal ini Wapres akan dibantu Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Keuangan.

Boediono mengatakan untuk membongkar kasus mafia pajak sampai ke

■ BERSAMBUNG KE HAL 9



NGANTOR LAGI: Bekas Kabareskrim Komjen Susno Duadji di Mabes Polri, kemarin. Dia bilang, jabatan apapun tak masalah. Bahkan, jabatan kopral pun akan diterimanya.

Reses NANAN SOEKARNA

Dipuji Pimpinan KPK

TOKOH yang satu ini sudah lama menghilang dari publik. Dimana saja? Yang jelas, Jenderal bintang tiga itu, tidak sedang bertapa. Kemarin, dia muncul di Gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Pusat. Ngepas di situ? Iwasan Mabes Polri itu rupanya datang ke KPK untuk menyerahkan seluruh "angpau" yang diterima ketika mengawinkan

anaknyanya. Acara pernikahan sudah berlangsung sekitar sebulan lalu. Menurut Nanan, sebagai pejabat publik, dia wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Termasuk sumbuhan yang didapatnya dari acara tersebut. "Saya menyampaikan, KPK lah yang meneliti, mana saja

■ BERSAMBUNG KE HAL 9



Gubernur tetap bisa diselidiki, disidik dan dipindankan bila memang melakukan penyimpangan. Kalau ditanya apakah Gubernur Yogya bisa diperiksa KPK atau aparat hukum lainnya, jawabannya jelas bisa

Pakar Hukum Telo Negara Prof Yusuf Isha Mahendra, saat memberikan pendapat tentang RUU Keistimewaan Yogya, di Komisi II DPR, kemarin.

INDIRA TANTRI, Putri Susno Duadi

Jarang Bermain Sama Cucu, Bapak Sibuk Membuat Pledoi

PUTRI Susno Duadi, Indira Tantri mengaku merasa senang bisa berkumpul kembali dengan Susno Duadi. Apalagi ayahnya sudah bisa bekerja kembali.

"Saya senang dapat kembali berkumpul dengan Bapak. Tapi, Bapak belum sepenuhnya bebas karena masih harus menjalani persidangan, dan persoalan hukumnya belum selesai. Sekarang, kan, bebannya cuma tidak ditahan saja," ungkap Indira kepada **Rakyat Merdeka**, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Berikut kutipan selengkap-lengkapnya:

Setelah bebas dari Rutan Bimob, Susno Duadi dikabar-kan pergi ke keluarga, apakah seluruh anggota keluarga ikut ke sana?

Beni, Kani pengi ke Bandung untuk menghadiri undangan acara pernikahan.

Bukankah sekaligus libur-an?

Tidak, kami hanya mengha-diri undangan, bukan untuk libur-an. Soalnya, ngak enak kalau tidak hadir, dan mereka telah mengundang kami.

Susno dikabar-kan sangat dekat dan menyayangi cucu-nya, apakah menghambikan waktu dengan cucunya?

Setelah keluar dari rutan-an, Bapak tetap tidak memiliki ba-

"Persidangan itu bukan untuk menunjukkan menang atau kalah. Tapi, untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah."

nyak waktu. Bapak tidak bisa bermain-mainkan menghambikan waktu bersama cucunya, karena sibuk menyusun nota pembe-lan (pledoi).

Berapa lama dengan cucu-nya?

Sebenarnya sekali. Bapak lebih banyak menghabiskan waktu dan bertemu pengacara-nya, karena Bapak menyusun pledoi-nya sendiri. Jadi, sama cucu jarang bermain, hanya sesekali saja.

Setelah bebas sampai hari ini (kemarin, red), Bapak hanya beberapa jam menghambikan waktu bersama cucunya.

Apa yang Anda rasakan dengan kembalinya Susno ke tengah keluarga?

Ya, sama seperti dahulu. Kalau sebelum di Rutan Bapak sibuk kerja, sekarang sibuk membuat pledoi. Ya begitu lah Bapak, se-nangnya mencari-cari kesibukan. Waktu masih ditahan, Bapak selalu melarang kami ber-lama-lama di Makro (Bimob), karena ada saja kesibukannya.

Tapi Anda bangga kan?

Bapak sosok yang me-m-banggakan. Selalu mengkalikan,

yang benar itu benar, dan yang salah adalah salah. Beliau juga menjadi contoh bagi saya ten-tang bagaimana cara mendidik anak. Sebab, anak saya juga laki-laki.

Apa keluarga tidak benci kepolisan?

O, tidak. Bapak tidak pernah membenci kepolisan. Sebab, selama ini juga tidak melakukan perlakuan terhadap institusi, hanya saja menyatakan tentang kebenaran.

Bapak bilang, bukan institusi atau lembaga yang yang salah, namun ada beberapa orang saja.

Apa harapan Anda terha-dap vonis nanti?

Kalau vonis, kami pastrah. Masyarakat dan rekan-rekan media dapat melihat sendiri proses persidangan yang tengah berlangsung. Menurut kami, persidangan itu bukan untuk menunjukkan menang atau kalah. Tapi, untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah.

Jadi, kami ya pasrah saja. Sebab, kalau persoalan pu-tusan yang bisa adili, ya hanya Allah. ■ ONI

HERAWATI, Istri Susno Duadi

Bapak Merasa Senang Kembali Pakai Seragam

Komisaris Jenderal (Komjen) Susno Duadi, kemarin, kembali melakukan aktivitasnya sebagai perwira tinggi di Mabes Polri.

KELUARGA mengaku sangat senang gara-gara bekas Kaba-reskrim Mabes Polri itu bisa bekerja kembali meski masih bersitus terdakwa.

"Nggak ada persiapan khusus untuk kembali masuk kantor. Yang jelas, kami senang karena Bapak kembali mengenakan seragam dengan bintang tiga di pundaknya," ujar istri Susno Duadi, Herawati, kepada **Rakyat Merdeka**, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

"Sudah lama seragamnya

nggak dipakai. Bapak senang kembali memakai seragam itu. Itu seragam sudah lama dan baru sekarang dipakai lagi, alham-duillah masih muat," tambahnya.

Berikut kutipan selengkap-lengkapnya:

Bagaimana persiapan Susno masuk kantor?

Biasa saja. Saya menyiapkan pakaian lengkap, lalu berangkat. Kemudian Pak Kapoli (Timur Pramudjo) menerimanya Pukul 16 WIB.

Apakah sudah disampaikan

ke Anda mengenai jabatan suaminy di Mabes Polri?

Kebebasan saya belum bertemu sama Bapak. Tadi, Saya sedang ke tempat anak saya. Jadi Bapak belum cerita. Saya hanya lihat running teks di televisi, tapi belum mendengar langsung dari Bapak. Jadi, saya belum dapat memberi kepastian.

Mengenal kasus yang diha-dapi suaminya, apa harapan Anda?

Ya kami optimis, lembaga peradilan lengkap, dapat menangkap kebenaran dan keadilan. Insya Allah, keadilan akan terlihat meskipun jalannya panjang dan melelahkan. Semoga Allah me-

menunjukkan keadilan dipengadilan ini dan hakim dapat menghakimi dengan tulus dan memutuskan dengan hati nurani.

Dalam persidangan, Pak Susno menyatakan, tidak ter-libat dalam kasus penyusapan dan korupsi?

Dari awal, kami sudah yakin itu. Insya Allah hakim akan memus-kan sesuai hati nurani dan Allah akan berikan jalan yang terbaik.

Jika terbukti ada oknum me-rekrutasi tersebut bagaimana?

Kami tidak akan dendam. Ke-luarga kami menyerahkan semua persidangan ini kepada Allah, se-tinggal kami tidak memiliki dendam. ■ ONI



HADIRI SIDANG: Istri Susno Duadi, Herawati (kanan) bersama anaknya, saat menghadiri sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Priman: Yudi RAKYAT MERDEKA

| PENGUMUMAN | | | |
|-------------------|------------------|---|--|
| Nomor : 42 / 2011 | | | |
| KETERANGAN | | | |
| No | Nama Pemohon | Tgl & No. Surat Izin + Lulus | Letak Tanah + Jalan + Denda + Keterangan |
| 1. | PRATIWI SOEWARNO | 24-10-2011 No. 027/2010 NIB 09.02.01.02.0275 90-12 | 1. Jalan Tegal Rt. 001/01 Rt. 002/01 Rt. 003/01 Rt. 004/01 Rt. 005/01 Rt. 006/01 Rt. 007/01 Rt. 008/01 Rt. 009/01 Rt. 010/01 Rt. 011/01 Rt. 012/01 Rt. 013/01 Rt. 014/01 Rt. 015/01 Rt. 016/01 Rt. 017/01 Rt. 018/01 Rt. 019/01 Rt. 020/01 Rt. 021/01 Rt. 022/01 Rt. 023/01 Rt. 024/01 Rt. 025/01 Rt. 026/01 Rt. 027/01 Rt. 028/01 Rt. 029/01 Rt. 030/01 Rt. 031/01 Rt. 032/01 Rt. 033/01 Rt. 034/01 Rt. 035/01 Rt. 036/01 Rt. 037/01 Rt. 038/01 Rt. 039/01 Rt. 040/01 Rt. 041/01 Rt. 042/01 Rt. 043/01 Rt. 044/01 Rt. 045/01 Rt. 046/01 Rt. 047/01 Rt. 048/01 Rt. 049/01 Rt. 050/01 Rt. 051/01 Rt. 052/01 Rt. 053/01 Rt. 054/01 Rt. 055/01 Rt. 056/01 Rt. 057/01 Rt. 058/01 Rt. 059/01 Rt. 060/01 Rt. 061/01 Rt. 062/01 Rt. 063/01 Rt. 064/01 Rt. 065/01 Rt. 066/01 Rt. 067/01 Rt. 068/01 Rt. 069/01 Rt. 070/01 Rt. 071/01 Rt. 072/01 Rt. 073/01 Rt. 074/01 Rt. 075/01 Rt. 076/01 Rt. 077/01 Rt. 078/01 Rt. 079/01 Rt. 080/01 Rt. 081/01 Rt. 082/01 Rt. 083/01 Rt. 084/01 Rt. 085/01 Rt. 086/01 Rt. 087/01 Rt. 088/01 Rt. 089/01 Rt. 090/01 Rt. 091/01 Rt. 092/01 Rt. 093/01 Rt. 094/01 Rt. 095/01 Rt. 096/01 Rt. 097/01 Rt. 098/01 Rt. 099/01 Rt. 100/01 Rt. 101/01 Rt. 102/01 Rt. 103/01 Rt. 104/01 Rt. 105/01 Rt. 106/01 Rt. 107/01 Rt. 108/01 Rt. 109/01 Rt. 110/01 Rt. 111/01 Rt. 112/01 Rt. 113/01 Rt. 114/01 Rt. 115/01 Rt. 116/01 Rt. 117/01 Rt. 118/01 Rt. 119/01 Rt. 120/01 Rt. 121/01 Rt. 122/01 Rt. 123/01 Rt. 124/01 Rt. 125/01 Rt. 126/01 Rt. 127/01 Rt. 128/01 Rt. 129/01 Rt. 130/01 Rt. 131/01 Rt. 132/01 Rt. 133/01 Rt. 134/01 Rt. 135/01 Rt. 136/01 Rt. 137/01 Rt. 138/01 Rt. 139/01 Rt. 140/01 Rt. 141/01 Rt. 142/01 Rt. 143/01 Rt. 144/01 Rt. 145/01 Rt. 146/01 Rt. 147/01 Rt. 148/01 Rt. 149/01 Rt. 150/01 Rt. 151/01 Rt. 152/01 Rt. 153/01 Rt. 154/01 Rt. 155/01 Rt. 156/01 Rt. 157/01 Rt. 158/01 Rt. 159/01 Rt. 160/01 Rt. 161/01 Rt. 162/01 Rt. 163/01 Rt. 164/01 Rt. 165/01 Rt. 166/01 Rt. 167/01 Rt. 168/01 Rt. 169/01 Rt. 170/01 Rt. 171/01 Rt. 172/01 Rt. 173/01 Rt. 174/01 Rt. 175/01 Rt. 176/01 Rt. 177/01 Rt. 178/01 Rt. 179/01 Rt. 180/01 Rt. 181/01 Rt. 182/01 Rt. 183/01 Rt. 184/01 Rt. 185/01 Rt. 186/01 Rt. 187/01 Rt. 188/01 Rt. 189/01 Rt. 190/01 Rt. 191/01 Rt. 192/01 Rt. 193/01 Rt. 194/01 Rt. 195/01 Rt. 196/01 Rt. 197/01 Rt. 198/01 Rt. 199/01 Rt. 200/01 Rt. 201/01 Rt. 202/01 Rt. 203/01 Rt. 204/01 Rt. 205/01 Rt. 206/01 Rt. 207/01 Rt. 208/01 Rt. 209/01 Rt. 210/01 Rt. 211/01 Rt. 212/01 Rt. 213/01 Rt. 214/01 Rt. 215/01 Rt. 216/01 Rt. 217/01 Rt. 218/01 Rt. 219/01 Rt. 220/01 Rt. 221/01 Rt. 222/01 Rt. 223/01 Rt. 224/01 Rt. 225/01 Rt. 226/01 Rt. 227/01 Rt. 228/01 Rt. 229/01 Rt. 230/01 Rt. 231/01 Rt. 232/01 Rt. 233/01 Rt. 234/01 Rt. 235/01 Rt. 236/01 Rt. 237/01 Rt. 238/01 Rt. 239/01 Rt. 240/01 Rt. 241/01 Rt. 242/01 Rt. 243/01 Rt. 244/01 Rt. 245/01 Rt. 246/01 Rt. 247/01 Rt. 248/01 Rt. 249/01 Rt. 250/01 Rt. 251/01 Rt. 252/01 Rt. 253/01 Rt. 254/01 Rt. 255/01 Rt. 256/01 Rt. 257/01 Rt. 258/01 Rt. 259/01 Rt. 260/01 Rt. 261/01 Rt. 262/01 Rt. 263/01 Rt. 264/01 Rt. 265/01 Rt. 266/01 Rt. 267/01 Rt. 268/01 Rt. 269/01 Rt. 270/01 Rt. 271/01 Rt. 272/01 Rt. 273/01 Rt. 274/01 Rt. 275/01 Rt. 276/01 Rt. 277/01 Rt. 278/01 Rt. 279/01 Rt. 280/01 Rt. 281/01 Rt. 282/01 Rt. 283/01 Rt. 284/01 Rt. 285/01 Rt. 286/01 Rt. 287/01 Rt. 288/01 Rt. 289/01 Rt. 290/01 Rt. 291/01 Rt. 292/01 Rt. 293/01 Rt. 294/01 Rt. 295/01 Rt. 296/01 Rt. 297/01 Rt. 298/01 Rt. 299/01 Rt. 300/01 Rt. 301/01 Rt. 302/01 Rt. 303/01 Rt. 304/01 Rt. 305/01 Rt. 306/01 Rt. 307/01 Rt. 308/01 Rt. 309/01 Rt. 310/01 Rt. 311/01 Rt. 312/01 Rt. 313/01 Rt. 314/01 Rt. 315/01 Rt. 316/01 Rt. 317/01 Rt. 318/01 Rt. 319/01 Rt. 320/01 Rt. 321/01 Rt. 322/01 Rt. 323/01 Rt. 324/01 Rt. 325/01 Rt. 326/01 Rt. 327/01 Rt. 328/01 Rt. 329/01 Rt. 330/01 Rt. 331/01 Rt. 332/01 Rt. 333/01 Rt. 334/01 Rt. 335/01 Rt. 336/01 Rt. 337/01 Rt. 338/01 Rt. 339/01 Rt. 340/01 Rt. 341/01 Rt. 342/01 Rt. 343/01 Rt. 344/01 Rt. 345/01 Rt. 346/01 Rt. 347/01 Rt. 348/01 Rt. 349/01 Rt. 350/01 Rt. 351/01 Rt. 352/01 Rt. 353/01 Rt. 354/01 Rt. 355/01 Rt. 356/01 Rt. 357/01 Rt. 358/01 Rt. 359/01 Rt. 360/01 Rt. 361/01 Rt. 362/01 Rt. 363/01 Rt. 364/01 Rt. 365/01 Rt. 366/01 Rt. 367/01 Rt. 368/01 Rt. 369/01 Rt. 370/01 Rt. 371/01 Rt. 372/01 Rt. 373/01 Rt. 374/01 Rt. 375/01 Rt. 376/01 Rt. 377/01 Rt. 378/01 Rt. 379/01 Rt. 380/01 Rt. 381/01 Rt. 382/01 Rt. 383/01 Rt. 384/01 Rt. 385/01 Rt. 386/01 Rt. 387/01 Rt. 388/01 Rt. 389/01 Rt. 390/01 Rt. 391/01 Rt. 392/01 Rt. 393/01 Rt. 394/01 Rt. 395/01 Rt. 396/01 Rt. 397/01 Rt. 398/01 Rt. 399/01 Rt. 400/01 Rt. 401/01 Rt. 402/01 Rt. 403/01 Rt. 404/01 Rt. 405/01 Rt. 406/01 Rt. 407/01 Rt. 408/01 Rt. 409/01 Rt. 410/01 Rt. 411/01 Rt. 412/01 Rt. 413/01 Rt. 414/01 Rt. 415/01 Rt. 416/01 Rt. 417/01 Rt. 418/01 Rt. 419/01 Rt. 420/01 Rt. 421/01 Rt. 422/01 Rt. 423/01 Rt. 424/01 Rt. 425/01 Rt. 426/01 Rt. 427/01 Rt. 428/01 Rt. 429/01 Rt. 430/01 Rt. 431/01 Rt. 432/01 Rt. 433/01 Rt. 434/01 Rt. 435/01 Rt. 436/01 Rt. 437/01 Rt. 438/01 Rt. 439/01 Rt. 440/01 Rt. 441/01 Rt. 442/01 Rt. 443/01 Rt. 444/01 Rt. 445/01 Rt. 446/01 Rt. 447/01 Rt. 448/01 Rt. 449/01 Rt. 450/01 Rt. 451/01 Rt. 452/01 Rt. 453/01 Rt. 454/01 Rt. 455/01 Rt. 456/01 Rt. 457/01 Rt. 458/01 Rt. 459/01 Rt. 460/01 Rt. 461/01 Rt. 462/01 Rt. 463/01 Rt. 464/01 Rt. 465/01 Rt. 466/01 Rt. 467/01 Rt. 468/01 Rt. 469/01 Rt. 470/01 Rt. 471/01 Rt. 472/01 Rt. 473/01 Rt. 474/01 Rt. 475/01 Rt. 476/01 Rt. 477/01 Rt. 478/01 Rt. 479/01 Rt. 480/01 Rt. 481/01 Rt. 482/01 Rt. 483/01 Rt. 484/01 Rt. 485/01 Rt. 486/01 Rt. 487/01 Rt. 488/01 Rt. 489/01 Rt. 490/01 Rt. 491/01 Rt. 492/01 Rt. 493/01 Rt. 494/01 Rt. 495/01 Rt. 496/01 Rt. 497/01 Rt. 498/01 Rt. 499/01 Rt. 500/01 Rt. 501/01 Rt. 502/01 Rt. 503/01 Rt. 504/01 Rt. 505/01 Rt. 506/01 Rt. 507/01 Rt. 508/01 Rt. 509/01 Rt. 510/01 Rt. 511/01 Rt. 512/01 Rt. 513/01 Rt. 514/01 Rt. 515/01 Rt. 516/01 Rt. 517/01 Rt. 518/01 Rt. 519/01 Rt. 520/01 Rt. 521/01 Rt. 522/01 Rt. 523/01 Rt. 524/01 Rt. 525/01 Rt. 526/01 Rt. 527/01 Rt. 528/01 Rt. 529/01 Rt. 530/01 Rt. 531/01 Rt. 532/01 Rt. 533/01 Rt. 534/01 Rt. 535/01 Rt. 536/01 Rt. 537/01 Rt. 538/01 Rt. 539/01 Rt. 540/01 Rt. 541/01 Rt. 542/01 Rt. 543/01 Rt. 544/01 Rt. 545/01 Rt. 546/01 Rt. 547/01 Rt. 548/01 Rt. 549/01 Rt. 550/01 Rt. 551/01 Rt. 552/01 Rt. 553/01 Rt. 554/01 Rt. 555/01 Rt. 556/01 Rt. 557/01 Rt. 558/01 Rt. 559/01 Rt. 560/01 Rt. 561/01 Rt. 562/01 Rt. 563/01 Rt. 564/01 Rt. 565/01 Rt. 566/01 Rt. 567/01 Rt. 568/01 Rt. 569/01 Rt. 570/01 Rt. 571/01 Rt. 572/01 Rt. 573/01 Rt. 574/01 Rt. 575/01 Rt. 576/01 Rt. 577/01 Rt. 578/01 Rt. 579/01 Rt. 580/01 Rt. 581/01 Rt. 582/01 Rt. 583/01 Rt. 584/01 Rt. 585/01 Rt. 586/01 Rt. 587/01 Rt. 588/01 Rt. 589/01 Rt. 590/01 Rt. 591/01 Rt. 592/01 Rt. 593/01 Rt. 594/01 Rt. 595/01 Rt. 596/01 Rt. 597/01 Rt. 598/01 Rt. 599/01 Rt. 600/01 Rt. 601/01 Rt. 602/01 Rt. 603/01 Rt. 604/01 Rt. 605/01 Rt. 606/01 Rt. 607/01 Rt. 608/01 Rt. 609/01 Rt. 610/01 Rt. 611/01 Rt. 612/01 Rt. 613/01 Rt. 614/01 Rt. 615/01 Rt. 616/01 Rt. 617/01 Rt. 618/01 Rt. 619/01 Rt. 620/01 Rt. 621/01 Rt. 622/01 Rt. 623/01 Rt. 624/01 Rt. 625/01 Rt. 626/01 Rt. 627/01 Rt. 628/01 Rt. 629/01 Rt. 630/01 Rt. 631/01 Rt. 632/01 Rt. 633/01 Rt. 634/01 Rt. 635/01 Rt. 636/01 Rt. 637/01 Rt. 638/01 Rt. 639/01 Rt. 640/01 Rt. 641/01 Rt. 642/01 Rt. 643/01 Rt. 644/01 Rt. 645/01 Rt. 646/01 Rt. 647/01 Rt. 648/01 Rt. 649/01 Rt. 650/01 Rt. 651/01 Rt. 652/01 Rt. 653/01 Rt. 654/01 Rt. 655/01 Rt. 656/01 Rt. 657/01 Rt. 658/01 Rt. 659/01 Rt. 660/01 Rt. 661/01 Rt. 662/01 Rt. 663/01 Rt. 664/01 Rt. 665/01 Rt. 666/01 Rt. 667/01 Rt. 668/01 Rt. 669/01 Rt. 670/01 Rt. 671/01 Rt. 672/01 Rt. 673/01 Rt. 674/01 Rt. 675/01 Rt. 676/01 Rt. 677/01 Rt. 678/01 Rt. 679/01 Rt. 680/01 Rt. 681/01 Rt. 682/01 Rt. 683/01 Rt. 684/01 Rt. 685/01 Rt. 686/01 Rt. 687/01 Rt. 688/01 Rt. 689/01 Rt. 690/01 Rt. 691/01 Rt. 692/01 Rt. 693/01 Rt. 694/01 Rt. 695/01 Rt. 696/01 Rt. 697/01 Rt. 698/01 Rt. 699/01 Rt. 700/01 Rt. 701/01 Rt. 702/01 Rt. 703/01 Rt. 704/01 Rt. 705/01 Rt. 706/01 Rt. 707/01 Rt. 708/01 Rt. 709/01 Rt. 710/01 Rt. 711/01 Rt. 712/01 Rt. 713/01 Rt. 714/01 Rt. 715/01 Rt. 716/01 Rt. 717/01 Rt. 718/01 Rt. 719/01 Rt. 720/01 Rt. 721/01 Rt. 722/01 Rt. 723/01 Rt. 724/01 Rt. 725/01 Rt. 726/01 Rt. 727/01 Rt. 728/01 Rt. 729/01 Rt. 730/01 Rt. 731/01 Rt. 732/01 Rt. 733/01 Rt. 734/01 Rt. 735/01 Rt. 736/01 Rt. 737/01 Rt. 738/01 Rt. 739/01 Rt. 740/01 Rt. 741/01 Rt. 742/01 Rt. 743/01 Rt. 744/01 Rt. 745/01 Rt. 746/01 Rt. 747/01 Rt. 748/01 Rt. 749/01 Rt. 750/01 Rt. 751/01 Rt. 752/01 Rt. 753/01 Rt. 754/01 Rt. 755/01 Rt. 756/01 Rt. 757/01 Rt. 758/01 Rt. 759/01 Rt. 760/01 Rt. 761/01 Rt. 762/01 Rt. 763/01 Rt. 764/01 Rt. 765/01 Rt. 766/01 Rt. 767/01 Rt. 768/01 Rt. 769/01 Rt. 770/01 Rt. 771/01 Rt. 772/01 Rt. 773/01 Rt. 774/01 Rt. 775/01 Rt. 776/01 Rt. 777/01 Rt. 778/01 |



Disinilah Kantor Kelurahan Halim Perdana Kusuma berada.

"Kami Nggak Memaksa Kok"

APA yang mendasari Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur meminta warga menyanyikan lagu kebangsaan?

Wakil Lurah Halim Perdana Kusuma, Marulima Sijabat menuturkan, kebijakan itu diterapkan karena perhatian melihat jiwa nasionalisme bangsa yang mulai memudar dan pemahaman masyarakat akan nilai kebangsaan di masyarakat mulai luntur.

"Imbuan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali nasionalisme masyarakat. Ide awalnya datang dari Pak Lurah (Yusuf Rasid—red) karena melihat nasionalisme yang mulai luntur. Untuk meningkatkan nasionalisme, dimulai dengan langkah kecil yakni dari pelayanan," ujarnya kepada *Rakyat Merdeka*.

Yusuf Rasid mulai menduduki posisi Lurah pada 26 Januari 2011. Pada hari pertama dia hari itu juga dilakukan sosialisasi mengenai kewajiban menyanyikan lagu kebangsaan ini.

"Kelurahan kita membawahi sebanyak 16 RW dan 144 RT. Jadi bersosialisasi melalui surat kepada RW, lalu RW ini yang menindaklanjuti ke RT. Kemudian RT yang akan meneruskan ke warganya. Karena apa? Karena seluruh pelayanan harus melibatkan pengantar dari RT/RW," ujar Marulima.

Sejumlah anggota TNI AU yang bermukim di kelurahan ini mendukung langkah ini. Bahkan, beberapa anggota yang sedang

mengurus surat-surat turut memberikan semangat kepada warga untuk bernyanyi.

"Karena warga kita yang banyak dari kalangan militer, respons positifnya cukup tinggi. RW-RW juga banyak dari militer, dewan kelurahan juga dari militer posifit memberikan tanggapan dan dukungan terhadap aturan ini," kata Marulima.

Kendati demikian, pihaknya tidak menutup mata ada anggota masyarakat yang enggan menerima aturan tersebut.

"Sebagian dari warga ada juga yang bilang 'kenapa sih pelayanan harus dipersulit lagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya'. Sebenarnya kita tidak mempersulit, kita hanya coba membangkitkan nasionalisme masyarakat dengan lagu Indonesia Raya," jelas Marulima.

"Kami nggak bisa memaksa. Kami coba bangkitkan. Kami ajak bicara baik-baik, imbui mereka untuk menyanyi. Beranyainya itu selain bersama di dalam ruangan. Kalau di luar tereskan juga seperti di rumah. Udh agak zamannya main paksa," ujarnya.

Dalam sebuah pertemuan kelurahan melaui 25 orang. "Dari 25 masyarakat yang datang paling banyak satu dua yang menolak. Respons warga sejauh ini sangat bagus," ujar Marulima. Menteri Dalam Negeri Guntawan Fauzi tak mempermasalahkan hal itu, sepanjang tidak menjadi syarat baku. "Ibu anjuran aja bagus. Kalau hanya anjuran aja bagus. Kalau tidak menjadi syarat tidak apa-apa," kata dia.

Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku.

PENGALAN lirik lagu *Indonesia Raya* terdengar sayup-sayup dari dalam Kantor Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Di tempat ini tidak sedang berlangsung upacara bendera. Juga tidak ada kegiatan formal pemerintahan lainnya. Aktivitas yang terjadi layaknya hari kerja biasa. Beberapa orang berpakaian dinas pegawai negeri sipil (PNS) terlihat berkeliling dari pekarangan gedung berlantai tiga ini.

Kelurahan Halim Perdana Kusuma punya cara unik dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Terhitung sejak tanggal 9 Februari 2011, kantor kelurahan ini mewajibkan setiap warganya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai "syarat" mendapatkan pelayanan.

Aturan tersebut berlaku bagi warga yang akan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM). Bukan itu saja, syarat ini juga mesti dipenuhi jika warga ingin meminta surat keterangan domisili.

Sayup-sayup suara nyanyian itu semakin terdengar jelas ketika mendekati teras. Menakik empat anak tangga yang dilapisi keramik, memasuki pintu kaca hitam yang diakhiri terbuka, baru ketahuan asal suara itu.

Suara nyaring ini ternyata berasal dari beberapa orang warga yang berkumpul di sebuah kursi tunggu. Jumlahnya sedikit sepuluh orang. Mereka mengambil sikap berdiri tegak sambil membentuk tiga barisan. Seorang orang wanita berdiri sendiri di bagian paling depan menghadap warga yang berbaris.

Layaknya paduan suara, wanita berkerudung ini kemudian bertindak sebagai *dirigen*. Kedua tangannya diluk-lukukkan membelah udara. Tangan kanan wanita tersebut digerakkan dengan lembut, meski kadang melenceng dari ritme. Warga bisa memahaminya karena wanita ini bukan seorang *dirigen* profesional. Iayaknya Addie MS.

Menyanyikan lagu kebangsaan sendiri ternyata bukanlah hal yang mudah. Lagu *Indonesia Raya* yang sudah diajarkan sejak sekolah dasar bahkan tak kanak-kanak, tak serta merta membuat masyarakat hafal saat terdengar lirik.

Tak semua warga bisa menyanyikan lagu karangan WR Supratman ini dengan lancar. Di beberapa bait lagu, mulut mereka tercekak karena lupa lirik. Seorang pria di barisan paling belakang memilih diam. Setelah mencoba mengingat-ingat liriknya, dia pun kembali ikut bernyanyi.

Beberapa warga lainnya memilih bernyanyi pelan. Suaranya yang keluar dari mulutnya terdengar samar-samar. Hal itu dilakukan untuk menyamakan lirik yang salah atau lupa ketika dinyanyikan.

Karena menyadari banyak warga yang mulai lupa, petugas kelurahan menyodorkan beberapa lembar kertas berisi liriknya lagu kebangsaan. Mereka yang merasa tidak lancar memilih mengambil kertas tersebut. Setelah bernyanyi, petugas mempersilakan warga duduk. Warga diminta sabar menunggu sampai namanya dipanggil oleh petugas yang berada di dalam ruangan pelayanan.

Dua buah kursi tunggu panjang terbuat dari besi, sengaja diletakkan di depan ruang pelayanan. Kursi ini dibuat saling berhadapan yang dipipekan ke dinding. Celah di antara dua kursi inilah yang dijadikan tempat warga menyanyi.

Satu per satu warga dipanggil ke dalam ruangan pelayanan.



Warga Halim Perdana Kusuma beraksi layaknya paduan suara.

Kepentingannya pun berbeda-beda, ada yang memperpanjang KTP yang sudah kadaluarsa, mengurus kartu keluarga dan sebagainya. Setelah berhasil mendapat apa yang diinginkan, mereka pun membubarkan diri satu persatu.

Meski awalnya terkejut dengan aturan baru tersebut, warga yang tengah mengurus keperluannya di kantor kelurahan ini mendukung kebijakan tersebut. Warga terlihat antusias menyanyikan lagu kebangsaan baik secara perorangan maupun kelompok. Bahkan, petugas kelurahan pun terlihat ikut memandu warga yang tak hafal liriknya.

Lucy, warga kompleks Trikora RT 10/11 menyambut positif aturan yang diterapkan Kelurahan Halim Perdana Kusuma. Wanita yang tampil sebagai *dirigen* ini mengaku terkenang akan masa sekolah dulu.

"Sudah lama sekali seperti ini saya nggak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau diingat udah puluhan tahun yang lalu.

Biar warga nggak lupa sama lagu kebangsaan sendiri, saya setuju aja kelurahan menerapkan aturan ini," ujarnya kepada *Rakyat Merdeka*. Kenarin (23/2). "Kalau orang tua semuanya saya lupa, wajar. Tapi itu sebenarnya juga nggak boleh. Nggak bisa dipungkiri banyak anak muda yang sudah lupa sama lagu kebangsaan sendiri. Ini kan gawat. Kalau nggak ada punya nasionalisme mau jadi apa bangsaini," kata perempuan berusia 30 tahun ini.

Senada dengan Lucy, Sunanto, anggota TNI AD mendukung Kelurahan Halim Perdana Kusuma. "Saya pikir ini bagus untuk menumbuhkan nasionalisme masyarakat," ujarnya. Sunanto yang datang bersama istrinya untuk mengurus pembuatan kartu keluarga (KK) mengaku, edak mahu bernyanyi ketika KK yang diurus sudah jadi nantinya.

"Kenapa mesti malu nyanyi. Saya jadi nggak sabar nih pengen cepat selesai suratnya, biar saya bisa nyanyi Indonesia Raya," ujarnya. Sekali idenya ini, saya sangat

mendukunglah," ujarnya sembari pamit pergi. Namun, tidak semua warga ternyata mengetahui aturan baru ini. Eka misalnya. "Saya belum mendengar soal imbuan itu," ujarnya sedikit bingung. Kendati demikian, Warga Jalan Komodor RT 02 RW 07 Kelurahan Perdana Kusuma ini tak keberatan jika diminta menyanyikan lagu kebangsaan sebelum mendapat pelayanan dari petugas kelurahan.

"Saya siap-siap aja, no problem. Saya ini positif untuk membangkitkan nasionalisme masyarakat yang sudah mulai pudar. Kalau alasan pihak kelurahan seperti itu saya ikut mendukungnya," kata pria berusia 24 tahun yang datang untuk mengurus perbaikan KK ini.

"Tujur, nasionalisme kita sangat perlu diperbaiki khususnya untuk anak muda. Masa lagu kebangsaan sendiri nggak hafal. Saya jadi nggak sabar nih pengen cepat selesai suratnya, biar saya bisa nyanyi Indonesia Raya," ujarnya sembari tertawa.

| BADAN PERTANAIAN NASIONAL KANTOR PERTANAIAN NASIONAL JALAN TANDA ALANG TIRU, 888750 JAKARTABARAT | | | | PENGUMUMAN (TENTANG BERHAK HILANG) No. 330/66/2011 | |
|---|--|----------------------|----------------------|--|------------|
| Untuk mendapatkan Berhak Hilang, sebagai pengantar Berhak Hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa: | | | | | |
| NO. | NAMA/ALAMAT PERUMAHAN | DAFTAR TANGGAL TANAH | DAFTAR TANGGAL TANAH | DAFTAR TANGGAL TANAH | KETERANGAN |
| | | DAFTAR TANGGAL TANAH | DAFTAR TANGGAL TANAH | DAFTAR TANGGAL TANAH | |
| 1. | RPA BERSEKUTU | | | | |

| BADAN PERTANAIAN NASIONAL KANTOR PERTANAIAN JAKARTA PUSAT Jalan Tondar Alang Tondar, 888750 JAKARTA PUSAT | | | | | PENGUMUMAN (Tentang Berhak Hilang) Nomor : 330/66/2011 | |
|---|--|------------------------------|-----|--|--|---|
| Untuk mendapatkan Berhak Hilang, sebagai pengantar Berhak Hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa: | | | | | | |
| No | NAMA/ALAMAT PERUMAHAN | HAK ATAS TANAH | NIK | PELOPOR ATAS TANAH | TANGGAL PERUMAHAN | KETERANGAN |
| 1. | ANAKY S. SILAH Gedung Berhak Hilang No. 330/66/2011 Jalan Tondar Alang Tondar, 888750 | Hak Guna Berkas Khusus | - | ANAKY S. SILAH Berkas Berhak Hilang | 10-04-1998 | 1. Surat Pernyataan |

PASANG SEGERA IKLAN ANDA DI SINI

021-53699507
53671716
5333156

021-53699507
53671716
5333156

The Advanced Riding Comfort & Most Fuel Efficient MPV* now comes with new style.

A Whole New Experience
Modern, nyaman serta irit. Itulah Grand Livina baru. Grille dan velg baru yang elegan ditambah interior all black engga bikin lengkap dengan white speedometer serta mesin berkelas CVT yang irit siap membawa Anda berkendara di macemnya lalu lintas kota atau menempuh perjalanan jauh sekalipun. Nikmat! pengalaman berkendara baru dengan Grand Livina baru.

Now elegant grille design
Now alloy wheel design
Now white speedometer
Now comfortable black interior
Now 1.8 Ultimate

SPECIAL PRICE FOR LIVINA OWNER
Khusus pemilik Grand Livina
Hutang Dealer
Nissan terdekat

Follow us on Twitter @NissanID

Jakarta: Bda, Ciper 380 4002, Binda 7486 2125, Cibus 625 4370, Indamaya 7591 1285, Kelon Jeruk 580 2201, Kelapa Gading 4265 3385, M1 Haryono 826 4750, Pantai Indah Kapuk 688 1395, Puri 666 97 117, Pondok Indah 729 3666, Puri Indah 8835 8570, Radin Inen 6651 0669, Ruri 633 0818, Suter 651 8138, TB Simatupang 765 4211, Waring Cincir 788 3398, Depok: Depok 777 4567, Bogor: Pajajaran 0251 832 6175, Tangerang: BSD 6515 3401, Cilemer 5578 0606, Jatek 556 566 80, Bekasi: Cikarang 891 17601, PT Nissan Motor Distributor Indonesia, sole distributor.

PAN Ogah Dipaparkan Partai Pendukung Mafia Pajak

GARA-GARA menolak hak angket pajak di Paripurna DPR, Partai Amanat Nasional (PAN) merasa dikesankan sebagai partai pendukung mafia pajak. PAN menolak pencitraan negatif itu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Tjatur Sapto Edi mengatakan, menolak hak angket pajak tak berarti menolak pemberantasan mafia pajak. Ini hanya beda instrumen. Pemberantasan mafia pajak bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya, kami akan mengaktifkan Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perampakan," kata Tjatur kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyatakan itu untuk menyikapi maraknya korupsi publik yang gesekan partai penolak hak angket di DPR, adalah partai yang mendukung para mafia pajak atau tidak serius dalam menuntaskan persoalan pajak.

"PAN berkomitmen menuntaskan persoalan pajak sampai ke akar-akarnya. Karena PAN tidak memiliki *track record* berhubungan dengan mafia pajak ataupun pengempungan pajak," tegasnya.

Partai berlabelan matahari terbit itu, tegas Tjatur, sangat mendukung dan berada di posisi dapat untuk menentaskan mafia pajak, sehingga pemerintahan negara dalam sektor perpajakan, tidak hanya 12,1 persen dari PDB, tapi bisa lebih besar.

"PAN juga ingin penerimaan pajak naik. *Tax ratio* bisa naik 4-5 persen menjadi 16-17 persen dari PDB, kalau mafia pajak diberantas," harapnya.

Menurut Tjatur, pembentukan hak angket dalam kasus mafia hukum dan pajak tidak tepat. Sebab, sesuai aturan yang berlaku, angket dibentuk apabila ada kebijakan pemerintah yang melanggar undang-undang.

Sementara dasar pembuatan hak angket mafia pajak ini, kata dia, hanya pada kasus-kasus hukum, seperti kasus Gays dan kasus Bahayim.

Menurut Tjatur, setiap penuntasan kasus tidak harus selalu melalui hak angket. Jika hak angket jadi instrumen dalam menuntaskan suatu kasus, dirinya tidak bisa membayangkan, bakal berapa banyak ada hak angket di DPR.

"Kalau ada kasus kemudian dijadikan angket, maka nanti



Tjatur Sapto Edi

sedikit-sedikit akan membentuk angket di DPR," sindirnya. Bagi dia, hak angket tidak bisa digunakan secara sembarangan. Jika angket dilakukan sembarangan, maka proses ketertarikan bisa kacau balau.

"Yang ada, energi kita terkuras mengungsi angket. Masalah kita lebih percaya politisi dari pada penegak hukum," tambahnya.

Untuk itu, Tjatur mengajak semua politisi partai di DPR untuk melakukan pemberantasan mafia hukum dan pajak melalui instrumen yang sudah ada, yaitu Panja. Melalui Panja, DPR bisa mengawasi secara ketat tentang proses hukum kasus mafia hukum dan pajak yang sudah berlangsung.

"Mari kita melakukan pengawasan secara ketat proses hukum kasus mafia hukum dan pajak secara ketat. Kami akan mengawal penegak hukum," ajak Tjatur.

Disinggung soal PAN dapat apa dari Pemerintah karena sudah mendukung Demokrat? "Perkara nanti kita dapat apa, itu bukan urusan kami, yang penting kami bela Negara," kilahnya.

Untuk diketahui, Tjatur terpilih sebagai Ketua Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perampakan DPR.

Ditempat yang sama, Ketua DPP Partai PAN Bima Arya Sugianto menambahkan, persoalan mekanisme penuntasan mafia pajak pernah juga dibahas di Seigab.

Dia menambahkan, tujuan dari masing-masing partai sama, yakni bagaimana menuntaskan atau memberantas kasus mafia pajak. Namun ada perbedaan dalam cara menuntaskannya.

"Kita lebih memilih mekanisme melalui panja, tidak melalui angket. Karena kalau angket kita khawatir unsur politis yang dominan dibanding penuntasan hukumnya," tutup Bima. ■ FAZ

Sidang Perdana UU Parpol Digelar Di MK Majelis Hakim Minta FPN Perbaiki Materi Gugatan

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta penggugat memperbaiki materi gugatan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Parpol. Terutama pasal yang mau diujikabarkan.

"MAJELIS hakim meminta materi gugatannya diperbaiki dan fokus di pasal 51," tutur Sekjen Forum Persatuan Nasional (FPN), Didi Supriyanto, kepada *Rakyat Merdeka* sesaat sidang perdana uji materi UU Parpol di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin.

FPN adalah forum yang mewakili belasan parpol yang gagal lolos *parliamentary threshold* (PT) pada Pemilu 2009.

Parpol-parpol yang tergabung dalam FPN itu melayangkan gugatan uji materi UU Parpol. Mereka menilai sejumlah pasal-pasal bertentangan dengan Konstitusi.

Didi melanjutkan, majelis hakim MK memberi waktu perbaikan draf gugatan maksimal 14 hari kerja. Tapi Didi berkecil hati karena sebagian parpol yang mengajukan gugatan dalam 7 hari. "Target kami, kurang dari seminggu drafnya sudah selesai," harap Didi.

Atas petunjuk majelis hakim, jelasnya, dalam perbaikan draf gugatan akan fokus pada pasal-pasal yang merugikan para pemohon. Terutama pasal, 51 ayat 1 UU Parpol yang mengatur verifikasi ulang bagi partai lama maupun baru untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Pada hari, kata Didi, partai yang sudah berubah hukum dan diakui, baik partai yang lolos PT atau tidak lolos, secara tegas dinyatakan menjadi peserta Pemilu 2014 oleh UU Parpol Nomor 16/2008.

"Kenapa harus verifikasi lagi? Kalau pasal itu dihapus untuk partai baru, kita tidak ada masalah," tandasnya.

Sementara itu, salah seorang kuasa hukum pemohon Suhadi Somomoejono meminta MK mencabut UU 2/2011 tentang Partai Politik. Suhadi berdalasan, dalam membentuk UU ini, partai-partai yang tidak berada di DPR tidak dilibatkan dalam pembahasan.

"Memohon kepada majelis untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 2/2011 bertentangan dengan Pasal 22A UU 1945. Undang-Undang dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," katanya dalam persidangan.

Dia menyampaikan beberapa alasan. Di antaranya, dalam proses pembuatan UU tersebut tidak dilakukan sosialisasi yang melibatkan pihak-pihak terkait. "Sosialisasi tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan," imbuhnya.

Pemohon juga menyampaikan alasan-alasan lain perlu dicabutnya UU ini. Seperti yang dijelaskan Suhadi, sudah terjadi perampasan hak demokrasi karena partai-partai peserta Pemilu 2009 yang tak lolos PT, harus kembali melakukan verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2014.

Pada hari, partai-partai itu berbandah hukum dan telah mengikuti Pemilu 2009.

"Partai-partai itu sudah sah



EDY KROENAKHYT/REUTERS

TOLAK UU PARPOL: Massa 18 parpol peserta Pemilu 2009 yang tergabung dalam Forum Persatuan Nasional (FPN) berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Mereka meminta MK membatalkan seluruh isi UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Parpol.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2008. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 2/2011, ada frasa kewajiban melakukan penyesuaian undang-undang, untuk mengikuti verifikasi.

Pada hari, katanya, partai-partai peserta Pemilu 2009 yang lolos atau tidak lolos PT, tidak perlu lagi verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2014.

"Karena Undang-Undang Parpol Nomor 10/2008 masih berlaku," tegasnya.

Sidang perdana kemarin dipimpin hakim konstitusi Muhammad Ali yang didampingi hakim konstitusi Maria Farida Indrati dan Harjono.

Uji materi itu diajukan 18 parpol peserta Pemilu 2009 yang tidak lolos PT. Parpol-parpol itu adalah, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi Pembinaan (PDP), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemendekatan Indonesia (PNBK), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Malahari Bari (PMB), Partai Pelopor, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Merdeka, dan Partai Syarikat Indonesia (PSI). ■ FAZ

Munas Di Yogya, PKS Ingin Hidupkan Dunia Pariwisata

PEMBUKAAN Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Yogyakarta, diakhiri tadi malam.

Memilih kawasan yang berada di bawah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X sebagai lokasi Mukernas, bukan tanpa alasan.

Menurut anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharram, PKS ingin hidupkan kembali industri pariwisata di Yogyakarta setelah berdamak positif bagi pertumbuhan sektor ekonomi nilai masyarakat.

PKS juga hendak membangun solidaritas dengan masyarakat Yogyakarta yang terimpas musibah. Untuk itu, PKS juga akan menggelar kerja bakti sosial dan bazar bagi pengusaha kecil dan menengah.

"Yogya juga merupakan contoh terjalarnya keruntuhan umat beragama dan antar etnis," kata Ecky kepada *Rakyat Merdeka Online*, kemarin.

Terakhir, kata Ecky, PKS sangat menjunjung tinggi khamah dan keragaman budaya bangsa Indonesia. Hingga kini, simbol budaya Yogyakarta masih menggar dan kokoh.

"Yogya juga merupakan contoh terjalarnya keruntuhan umat beragama dan antar etnis."

Sementara itu, pengamat politik Alfian Alfian mengatakan, sudah ada kesadatan dan upaya dari elite-elite PKS untuk tidak lagi tampil eksklusif dan mau menerima masukan-masukan dari eksternal partai.

"Tahanya itu, mereka juga menunjukkan tidak lagi bernuansa transnasional, tapi lebih mengedepankan nilai lokal Indonesia. Itu terlihat dari penampilan fisik maupun materi pemikiran dua tokoh PKS, Anis Matta dan Fakhri Hamzah," jelasnya.

Menurut dosen Universitas Nasional (Unas) Jakarta ini, sejak Munas di Bali PKS sudah menjadi partai terbuka dan pada pertemuan PKS di hotel berbintang lima, Ritz Carlton, rencana untuk menjadikan PKS sebagai partai terbuka dimatangkan.

"Terakhir, menjelang Mukernas di Yogya sekarang ini, PKS kembali menegaskan dirinya terbuka, bukan partai Islam yang eksklusif, tapi inklusif dan mengakomodasi kalangan non muslim. Karena itu, PKS sudah tidak ragu meredakan simbol-simbol daerah," ujar Alfian yang juga aktif di Akbar Tandjung Institute ini. ■ FAZ



EDY KROENAKHYT/REUTERS

PUKUL GONG:

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, didampingi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Jafar Hafshah, memukul gong saat pembukaan acara Round Table Discussion Partai Demokrat Bidang Kasra dan Perakonomian, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, kemarin.

PPP Tawarkan Muchdi Ketua PPP Bidang Keamanan

SEKJEN Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Irgan Chaimul Mahfid, menyatakan PPP menyiapkan posisi bagi Muchdi PR di pengurusan pusat partai itu jika wakil ketua umum Partai Gerindra itu serius ingin bergabung. Irgan mengatakan, bekas komandan jenderal Kopassus TNI AD itu akan diberi posisi yang membina keamanan partai. "Muchdi lebih pas menangani bidang pertahanan dan keamanan partai," kata Irgan di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Muchdi sangat tepat mengurus bidang ini karena selaras dengan latar belakangnya sebagai tentara.

"PPP membutuhkan seorang ahli di bidang tersebut, karena selama ini belum tercapai optimal. Kami membutuhkan orang yang bisa memahami berbagai persoalan dalam maupun luar negeri. Misalnya, orang yang mampu memahami konflik sosial dengan pendekatan keamanan," ujar Irgan.

"Muchdi lebih pas menangani bidang pertahanan dan keamanan partai."

Irgan menegaskan, terlepas motif apa di balik kepindahan Muchdi, PPP akan tetap menegakkan prinsipnya.

"Mudah-mudahan Muchdi bisa cepat untuk membangun platform PPP sekaligus memahami visi misi PPP," harapnya.

Irgan mengatakan bahwa karakter PPP berbeda dengan Partai Gerindra. Karena itu dia berharap, Muchdi mampu cepat beradaptasi dengan PPP.

"Latar belakang PPP dengan Gerindra beda. Dia tentara dan

dari partai berbasis nasionalis. Nah, ketika masuk ke partai Islam, tentu saja berbeda garis pengembangannya," ujarnya.

Ketertarikan berbeda disampaikan Wakil Sekjen PPP, Romahurmuzyi. Dia mengatakan, hingga saat ini PPP belum memutuskan dan masih mencari posisi yang tepat untuk Muchdi.

"Kita belum memikirkan ke situ. Pak Muchdi hingga kini belum berinteraksi langsung dengan DPPPPP. Jadi kita tunggu saja," katanya. ■ CR-1

Pram: Anas Lihai Jadi Pengamat Bola

POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung, menilai Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum lebih lihai sebagai pengamat bola, tapi belum tentu di dunia politik. Sebaliknya, menurut Pram, prediksi Anas tentang pertandingan sepakbola bisa tepat.

"Dalam hitung-hitungan Anas, Indonesia mengalami kekalahan dari Turki 1-3 dalam pertandingan 1-3 dari Turki. Ini faktanya Anas mumpuni sebagai pengamat bola," kata Pram kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Namun untuk urusan politik di DPR, imbuh Pram, belum tentu Anas lihai. Pram memang sama sekali tidak menyebut Anas tidak mumpuni sebagai ketua umum

Partai Demokrat.

"Saya tidak katakan Anas tidak mumpuni di Partai Demokrat. Yang saya lihat, Anas punya hambatan tersendiri dengan SBY dan SBY bisa langsung berbicara dengan semua ketua umum partai politik lainnya," ujar Pramono yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Bukti lainnya, sebut Pram, untuk menggagalkan dukungan penolakan usulan angket mafia pajak pada paripurna Selasa (22/2) lalu, SBY menunjuk langsung Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Jafar Hafshah, untuk melakukan lobi-lobi politik di DPR.

Bukan memerintahkan Anas. "SBY justru memerintahkan Pak Jafar Hafshah untuk *door to door* dengan semua fraksi di DPR," ucap Pramono. ■ JPN

Lily Siap Di-PAW Muhaimin Iskandar

KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, berjanji akan menindak tegas bibinya, Lily Wahid karena membolot dari instruksi partai menolak hak angket pajak.

Pada Sidang Paripurna soal hak angket pajak, ada dua anggota Fraksi PKB mendukung hak tersebut. Mereka adalah Lily dan Effendi Chori alias Gus Choi. Keduanya terancam kena sanksi dari Muhaimin.

Lily menunggu ketegasan sikap Muhaimin. "Saya sangat siap. Saya menunggu sikap tertulis dari mereka. Jangan hanya katanya-kata, tapi tertulis biar saya bisa melaksanakan hak hukum saya," kata Lily kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Anggota Komisi XI DPR ini menegaskan, Muhaimin tidak bisa begini saja menepi atau *me-recall*-nya dari DPR. Dia juga berjanji akan mengungkap uji materi UU MPR, DPR, DPRD tentang penggantian antar waktu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekarang saya sedang uji materi pasal *recall* di MK. Kalau mau *recall* saya, tunggu sampai selesai proses di MK," tandas dia kandung almarhum bekas Pre-



Lily Wahid

siden Abdurrahman Wahid ini.

Secara terpisah, Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding menegaskan, pihaknya akan memberi sanksi pada kedua anggota Dewan dari PKB itu.

"Aspirasi dari teman-teman mengingpin agar mereka diberi *penuntutan* (hukuman)," kata Karding. Khusus untuk Lily, Karding mengaku akan mengusulkan agar dia diberi sanksi dari "Karena Bu Lily sudah terlalu sering melanggar. Seperti saat kasus Century, juga angket-angket lainnya. Mengingat saya sampai PAW (pergantian antar waktu)," tandasnya. ■ CR-1

Anggopo Cash Back



Promo Tabung Bensin Induk
Setiap pembelian bensin *Anggopo*
GRATIS PERAWATAN hingga **2 TAHUN**
Anggopo CASH BACK hingga **25 JUTA**
Anggopo VOUCHER BELANJA
hingga **Rp. 500.000**

Layanan Perawatan
TUNE UP
GRATIS SPOKING / GRATIS UJI EMISI /
DISCOUNT 20%

SUN MOTOR
PT SUN MOTOR JAKARTA

Jl. Matraman Raya 140 Jakarta
Telp. (021) 8582055 / 8582056-58
www.sunmotor.com

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".



Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengadilan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

Dan seterusnya

Kewenangan Mahkamah

- [3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

[3.5] Menimbang bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon secara *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam UU Pengadilan Anak sehingga substansi permohonan Pemohon sangat relevan dan harus dipertimbangkan secara cermat dan akurat dalam pokok permohonan;

- Pasal-pasal tersebut di atas bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945, yakni:
- Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
 - Pasal 26D ayat (1) UUD 1945
 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
 - Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
 "Hak anak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikompromikan".

- **Bahwa** meskipun Komite Hak-Hak Anak PBB merekomendasikan batas minimum pertanggungjawaban hukum anak, yakni 12 tahun, namun batas usia demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk menafikan konstitusionalitas batas usia Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadanan Anak;
- **Bahwa** pilihan penuntutan pidana penjara terhadap anak diserahkan kepada kebijakan hakim, sedangkan pembedaan perlakuan dan hukuman tentunya didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak;

[3-20] Menimbang bahwa isu hukum yang harus diberi penilaian

1. Apakah batas usia anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun merupakan batas usia yang terlalu rendah sehingga dapat melanggar hak-hak konstitusional anak dan bertentangan dengan UUD 1945?
2. Apakah penerapan hukum melalui peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat merupakan ketentuan yang bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana dan bertentangan dengan UUD 1945?
3. Apakah klausul Anak Nakal dapat dipidana penjara di

DPR Terus Persoalkan
Kebijakan Impor Beras

Marwan Ja'far

RENCANA impor beras yang akan dilakukan pemerintah terus menuai protes dari kalangan Senayan. Kali ini, protes diorganisir Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far.

Dalam sambutan pengantar diskusi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin, Marwan mengatakan, masalah impor beras telah menjadi masalah nasional yang serius. Hal ini terkait dengan kedaulatan nasional, sekaligus harga diri bangsa.

"Di satu sisi pemerintah menginginkan swasembada pangan, sementara pada saat yang bersamaan pemerintah juga melakukan impor pangan. Tentu ini sangat kontradiktif," katanya.

Sebelumnya, Fraksi PDIP dan Gerindra juga menolak rencana impor beras. Keduanya mendesak agar pemerintah mencabut Peraturan Menteri Keuangan (Permendik) No 241 Tahun 2010 tentang pemberian bea masuk impor beras dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 39 Tahun 2011 tentang ketentuan impor barang jadi.

Marwan mengajak semua pihak untuk mencari solusi terkait impor beras ini. Salah satu caranya, kata dia, dengan menyempurnakan regulasi, mengaitkan infrastruktur pertanian dan menyelesaikan faktor-faktor yang menghambat kedaulatan pangan.

Dia mengatakan, sebagai negara agraris, Indonesia sangat mudah diintervensi berbagai jenis pangan. Namun karena Indonesia harus mengimpor pangan hasil panen hingga 30 persen pada tahun 2011 ini, impor beras diproyeksikan mencapai 1,75 juta ton. ■ HPS

gara, baik terkait dengan distribusi pangan, penanaman bibit dan jenis tanaman secara sustainable untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.

Bulog Nggak Setuju

Sementara itu, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sutarto Alimoeso yang menjadi pembicara mengaku tidak setuju dengan kebijakan impor beras. Namun, kata dia, fakta-nya saat ini stok pangan nasional masih kurang.

"Makanya dibutuhkan upaya solusi yang baik menyangkut ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, stabilitas harga pangan serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang cukup memadai," ujarnya.

Nara sumber lainnya yang hadir adalah Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Udhoro Kasih Anggoro MS dan Ketua PKS IV Fraksi PKB, Ibnu Muliawan.

Sebelumnya, Fraksi PKB menyebutkan, Indonesia bakal menjadi importir beras keempat terbesar di dunia. Bahkan Departemen Pertanian AS memprediksi, Indonesia akan kembali mengimpor beras hingga 1,75 juta ton beras atau naik 800 ribu ton pada 2011.

Sementara itu, tingkat konsumsi beras terus meningkat. Pada 2003, konsumsi beras penduduk Indonesia masih 135 kg per orang per tahun. Pada 2009 naik menjadi sekitar 139 kg per orang per tahun.

Angka konsumsi tersebut melampaikan orang Indonesia sebagai konsumen beras tertinggi di dunia. Padahal, rata-rata konsumsi beras internasional hanya sekitar 60 kg per orang per tahun.

Di tengah konsumsi yang terus meningkat, produksi padi nasional justru merosot pada tahun 2011 ini. Perubahan iklim yang memicu serangan hama dan terus berkurangnya lahan pertanian diperkirakan bakal menyebabkan kemerosotan hasil panen hingga 30 persen pada tahun 2011 ini, impor beras diproyeksikan mencapai 1,75 juta ton. ■ HPS



NGOMONGIN GAYUS: Bekas Kapolri Bambang Hendarso Danuri didampingi Tim Khusus Anti Mafia Hukum Polri in Mathius Salampang, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR, Jakarta, kemarin. Rapat membahas pemberantasan Mafia Hukum dan Pempajakan dan kasus Gayus Tambunan.

RICK HANDUT/USURUM

Anggota DPR Plus Model
Mulai Diutak-atik PKS

Rieke: Yang Lain Juga Ada Yang Jadi Pengusaha

Anggota DPR dinilai tidak etis menjadi bintang iklan produk komersial. Anggota DPR diwajibkan menjaga citranya sebagai wakil rakyat.

ADALAH politisi PKS Fahri Hamzah yang mengkritik aktivitas anggota DPR yang menjadi bintang iklan produk komersial. Kata dia, selain bekerja sesuai fungsi dan tugasnya, anggota DPR juga harus menjaga citranya sebagai wakil rakyat.

"Masa ada anggota dewan yang jadi bintang iklan sabun Kalan berbicara etik, ini tentu tidak patut," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Siapa orangnya? Wakil Ketua Komisi III DPR ini ogah menyebutkan nama anggota DPR yang menjadi bintang iklan sabun komersial. Dia menyuarakan, sebaiknya anggota DPR tersebut segera fokus kembali pada tugasnya di DPR.

"Dia itu menjadi anggota DPR ingin mewakilkan sabun komersial atau mau mewakilkan rakyat. Sebagai anggota menjaga citranya sebagai anggota dewan, jangan malah menjadi iklan komersial," imbuhnya.

Diketahui, anggota DPR periode 2009-2014 ini banyak diisi dari kalangan selebritas. Tak jarang, meski sudah menjadi wakil rakyat, kalangan selebritas masih banyak yang menjalankan profesinya itu, baik sebagai bintang iklan, presenter, penyanyi dan lain-lain.

Pernyataan Fahri menimbulkan protes dari sejumlah anggota DPR yang berlatar belakang selebritas. Misalnya, anggota

DPR dari Fraksi PDIP Rieke Dah Pratika yang sampai saat ini masih menjadi bintang iklan minuman berenergi.

Kata Rieke, saat ini sudah tidak tepat lagi permasalahan kesibukan lain anggota DPR, selain menjadi politisi. "Malas saya kalau masih mengomentari hal tersebut, karena tidak produktif," katanya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Dia bilang, bukankah di Senayan juga banyak anggota DPR yang memiliki kesibukan lain, seperti pengusaha dan pengacara. "Tapi tidak dibicarakan. Kenapa yang berlatar belakang artis saja yang dibicarakan?" ujarnya.

Rieke menjelaskan, kalau pun saat ini ada anggota DPR yang masih terbelah dengan kesibukan di dunia hiburan, hal itu tidak bisa dianggap mengabaikan tanggung jawab politiknya.

"Lihat saja di DPR, saya sendiri tidak pernah mengabaikan tugas dan tanggung jawab di komisi. Bagi kami dan mungkin teman-teman anggota DPR yang memiliki latar belakang sama dengan saya, DPR ini tetap menjadi prioritas," katanya.

Anggota DPR dari Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo yang juga kondisioner mengemukakan, pilihan profesi personal anggota DPR tidak bisa disalahkan, atau pun dipaksa untuk dihilangkan. Sebab yang terpenting, sambung Eko, kinerja dan perannya se-

bagai anggota DPR tidak diabaikan.

"Kalau karena kesibukannya di dunia hiburan, lalu tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR terabaikan, itu yang tidak benar. Dan setiap orang, menurut saya memiliki cara yang berbeda dalam mengatur waktunya," tegas anggota Komisi X DPR ini. ■ SIS



Masa ada anggota dewan yang jadi bintang iklan sabun. Kalau berbicara etik, ini tentu tidak patut.

FAHRI HAMZAH

Panja RUU JPH Akomodir
Aspirasi Konsumen-Produsen

PEMBAHASAN Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (Panja RUU JPH) akan dilakukan dengan hati-hati. Di harapkan, undang-undang yang akan dihasilkan ini tidak merugikan, baik produsen maupun konsumen.

"RUU ini sangat bermanfaat dengan produsen makanan, obat dan kosmetika. Kami menginginkan undang-undang yang adil dan tidak merugikan," kata dia, akan membawa konsep ini ke DPR, kemarin.

Diketahui, Panja RUU JPH saat ini sedang intensif meminta masukan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadiri), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (PPKI) dan Asosiasi Franchise Indonesia (AFSI) dan International Pharmaceutical Manufacturing Group.

Kader Banteng ini mengatakan, Panja JPH belum memutuskan badan atau kementerian yang akan melakukan penelitian untuk sertifikasi halal. "Apakah kalau badan, nanti badannya independen, seperti apa. Semuanya mengacu kepada laboratorium penelitian yang sama, IPB, MUI, dan termasuk BPOM," ujarnya.

Sementara itu, anggota Panja RUU JPH Adang Ruchiana Kadiri Indonesia yang menginginkan Undang-undang JPH berprinsip *voluntary* (sukarela) dan bukan *mandatory* (wajib).

Dia mengatakan, jika RUU JPH bersifat *mandatory* yang wajib dan mengikat untuk semua produsen yang ada di Indonesia, berpotensi utopia produk nonhalal yang diperkenalkan baru nonmutasi. Sifat *mandatory*, kata dia, akan membawa konsekuensi tinggi terhadap biaya tambahan dalam produksi.

"Ya meskipun ada dua pilihan kerelaan mengurangi profitnya dan menaikkan harga produk. Itu akan berdampak negatif terhadap iklim investasi dan tenaga kerja di Indonesia," katanya.

Secara terpisah, anggota Komisi VIII Ali Maschan Moesa justru menantang para produsen untuk menerapkan sertifikasi halal pada produknya jika anggarannya disediakan pemerintah.

"Kalau persoalan ini menyangkut anggaran, jika pemerintah menyediakan anggaran untuk proses sertifikasi, apakah akan berubah sukarela menjadi suatu keharusan," pungkasnya. ■ ARF

Kuncen Parlemen

Agun Gunandjar Sudarsa

Bidik Kursi DPD

SUDAH empat periode politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menjadi anggota DPR sejak Orde Baru hingga sekarang.

Sudah paokah Agun? Politisi kelahiran Bandung, 13 November 1958 ini mengaku periode 2009-2014 ini sebagai masa baktinya yang terakhir menjadi anggota DPR. Karenanya, dia memilih berikhtisam, Agun akan mencoba tantangan baru sebagai anggota DPD pada pemilu 2014 nanti. Bahkan dia memiliki impian, bukan hanya sebagai anggota DPD saja melainkan menjadikan pimpinan DPD, tuturnya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Kenapa rela meninggalkan DPR? Anggota Komisi II DPR ini mengaku, untuk 2014, DPR sudah tidak ada lagi tantangan. Format dan desain DPR sudah terbentuk dengan aturan yang kuat di dalam pakta undang-undang politik.

"Desain sudah ada, tinggal budaya politik saja yang perlu diperbaiki," tuturnya.

Dia membantah rencana perbandingan ke DPD disebut sebagai haus jabatan. Dengan tegas dia mengatakan, politik bukan pekerjaan melainkan panggilan.

Agun mengatakan, politik bukan pekerjaan melainkan panggilan.

Apa rahasia bisa terpilih empat periode? Anggota DPR dari Dapil Jabar X ini mengaku, ada dua alasan kenapa masyarakat percaya pada dirinya. Yaitu, menjadi silaturahmi dan memperhatikan konstituen.

"Yang terpenting, tetap ada masalah apalagi isu yang tidak sedang terdapat kita. Jangan pernah lari, tapi muncul berkeadilan," bebernya. Dia mengaku selalu menjadi objek *black campaign* setiap masa kampanye pemilu legislatif. ■ SIS



Agun Gunandjar Sudarsa
Lahir, 13 November 1958
di Bandung
Majelis Kriminologi Universitas Indonesia
Pekerjaan Terakhir: PNS Departemen Kesehatan

Mendalami RUU Pekerja Rumah Tangga (3/Selesai)

Lindungi Anak-anak, Usia PRT Dibatasi

Usia pembantu rumah tangga akan dibatasi. Anak-anak di bawah usia 18 tahun dilarang menjadi PRT.

MENURUT Koordinator Pekerja Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraeni, hingga sekarang ini, banyak PRT yang di bawah umur. RUC PRT, kata dia, perlu mengatur batasan usia anak-anak yang ingin bekerja.

"Selama ini pemerintah terkesan membiarkan terhadap banyaknya fenomena pekerja anak di bawah umur. Selama ini, di berbagai sektor banyak sekali anak di bawah umur yang dipekerjakan dan pemerintah

diam," tegasnya.

Lita mengusulkan agar RUU PRT mencantumkan delapan klasifikasi pekerja rumah tangga. Yaitu kelompok pekerjaan rumah, mencuci pakaian, membersihkan rumah bagian dalam, merawat dan menjaga anak, merawat orang sakit. Atau ada orang yang mempunyai kemampuan berbeda, kelompok pekerjaan mengemudi dan kelompok pekerjaan menjaga rumah.

"Ibu perlu diatur dalam undang-

undang PRT ini," imbuhnya.

Namun, Ketua Komnas Perlindungan Anak Artist Merdeka Sirat menilai pengaturan larangan PRT di bawah usia 18 tahun. Sebab, kata dia, salah satu alasan umum kenapa anak-anak di bawah 18 tahun bekerja adalah karena faktor ekonomi.

"Tentu, karena kondisi ini tidak bisa disalahkan anak itu akhirnya terpaksa menjadi PRT," ujarnya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Dia bilang, hal terpenting yang harus diadukan dalam RUU PRT adalah perlindungan dan jenis pekerjaan bagi si anak tersebut.

"Dan yang dilarang, bukanlah pada anak, melainkan majikan atau kelompok tertentu yang sengaja mengeksploitasinya," katanya.

Misalnya, kata Artist, anak yang dipekerjakan sebagai PRT harus masuk kategori pekerjaan ringan dan waktu kerjanya tidak lebih dari 3 jam sehari. Hal ini katanya, penting untuk tidak menghilangkan proses perkembangan anak.

Selain itu, lanjutnya, perlindungan itu perlu diatur khusus bagi anak di bawah 18 tahun yang bekerja sebagai PRT. "Dia diberikan jaminan pendidikan, kesehatan, gaji dengan upah minimal orang dewasa, serta tidak boleh dipekerjakan pada malam hari," ujarnya.

Sosilog Univeras Indonesia (UI) Thamrin Tagalaga menilai, batasan usia bagi PRT minimal 18 tahun tidak realistis. Menurut dia, pihak yang mengusulkan tentang batasan umur ini terlalu melihat pada kakamata Jakarta saja, bukan lingkup wilayah pedesaan.

"Sistem tolong menolong ini jangan dipandang menggunakan kakamata dua sistem industri. Di Indonesia, kan namanya tolong menolong sudah biasa. Kalau ada saudara yang kekurangan ya diberi pekerjaan, meski bantu-bantu saja. Apalagi kalau keluarga tersebut kekurangan," tambahnya. ■ SIS

Mimbar Legislati

Head Office: Gedung Graha Pena Lt. 1, Jl. Kebajoran Lama No. 12 Jakarta Selatan. Anda dapat menghubungi Bpk. Imron (021) 94070331 / 085692471323

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERBARU Kata Kunci 1000 Kata Kunci Rp. 41.900 | TERBARU 1000 Kata Kunci Rp. 36.000 | TERBARU 1000 Kata Kunci Rp. 43.000 | TERBARU 1000 Kata Kunci Rp. 50.000 | TERBARU 1000 Kata Kunci Rp. 30.000 | TERBARU 1000 Kata Kunci Rp. 20.000 | TERBARU 1000 Kata Kunci Rp. 30.000 | TERBARU 1000 Kata Kunci Rp. 38.000 | TERBARU 1000 Kata Kunci Rp. 45.000 | TERBARU 1000 Kata Kunci Rp. 35.000 | DISKON 25%* 085692471323 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

melanggar hak konstitusional anak yang bertentangan dengan UUD 1945?

[3.21] Menimbang bahwa pada dasarnya sistem peradilan anak (*juvenile justice system*) merupakan sistem peradilan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesempatan antara kepentingan anak dan ketertarikan orang secara adil dan seimbang. Sistem peradilan anak ini diarahkan kepada penanganan keadaan khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan lebih memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep peradilan (*sentencing*) semata-mata;

[3.22] Menimbang bahwa pendekatan pidana (*penalty approach*) yang diadopsi sistem peradilan anak adalah lebih pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dibandingkan pada penerapan sanksi *an sich*;

[3.23] Menimbang bahwa keseimbangan dari sistem peradilan anak memiliki tiga filosofi yang secara bersama-sama harus diterapkan yakni perlindungan masyarakat (*community protection*), kompetensi perkembangan (*development competency*) dan akuntabilitas (*accountability*). Filosofi keseimbangan ini secara cermat juga harus diterapkan di samping memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

[3.24] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat keberadaan UU Pengadilan Anak ini seharusnya diadopsi untuk memberikan perlindungan terbaik pada anak untuk dapat menjamin hak hidup (*rights to life*), hak kelangsungan hidup (*rights to survival*), dan hak tumbuh kembang anak (*rights to develop*). Keberadaan UU Pengadilan Anak sebagai Undang-Undang yang secara khusus ditujukan bagi kepentingan terbaik bagi anak adalah bentuk dari *affirmative action* bagi Anak;

[3.25] Menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan ketentuan perundang-undangan tentang Pengadilan Anak, Mahkamah memandang terdapat substansi atau materi Undang-Undang *a quo* yang perlu diperbaiki, seperti Pasal 2 ayat (2) huruf a yang menyatakan, "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Naksal ialah: a. Pidana penjara, b. Pidana kurungan, c. Pidana denda, atau d. Pidana pengawasan". Sistematisasi rumusan tersebut seharusnya meniadakan pidana pengawasan dan yang terakhir barulah pidana penjara dengan rasio hukum sebagaimana terurai dalam paragraf [3.22] dan [3.23] di atas;

[3.26] Menimbang bahwa dari enam pasal yang dimohonkan untuk diuji, para Pemohon meminta tiga pasal dalam UU Pengadilan Anak untuk diputus berbentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga pasal tersebut adalah Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Anak;

[3.27] Menimbang bahwa selain ketiga pasal yang dimohonkan untuk dicabut dan dinyatakan inkonstitusional, para Pemohon juga meminta Mahkamah untuk memberikan putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat memberikan arti bahwa sebuah pasal dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai dengan pemahaman tertentu. Dalam hal ini, tiga pasal yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 22 UU Pengadilan Anak;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah mencabut frasa, "...*maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan*," dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak. Para Pemohon mendalilkan bahwa keberadaan frasa tersebut telah memberikan beban yang lebih berat dan samir dalam mengemukakan "Anak Naksal" Itali ini disebabkan frasa *a quo* telah menimbulkan relativitas pemakaian di masing-masing budaya dan lingkup masyarakat. Pemohon menyatakan bahwa keberadaan frasa dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak karena tidak adanya standar atau ukuran yang jelas mengenai apa definisi anak naksal menurut ukuran-ukuran sosial yang amat beragam dan selalu berkembang.

Bahwa Mahkamah telah mendengarkan ahli Pemeritah, yakni Dr. Mudzakir, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa keberadaan klausula dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak tentang definisi Anak Naksal telah melakukan tindak pidana yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat, adalah merupakan norma hukum yang lazim dan sesuai secara masyarakat yang heterogen dan sistem hukum pidana di Indonesia. Hal tersebut memberikan bukti bahwa Undang-Undang *a quo* telah mengakomodasi heterogenitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Bahwa sepanjang pendapat hukum ahli Pemohon, Dr. Surastini, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak adalah hukum tidak tertulis berupa hukum adat atau kebiasaan sehingga dapat difatorkan untuk memperoleh kemungkinan seorang anak untuk dapat dijerat dengan tindak pidana sehingga bertentangan dengan asas pidana, "*Nulius delictum nulli poena sine praevia lege poenali*". Menurut Mahkamah, pendapat hukum tersebut adalah tidak tepat menurut hukum karena ketentuan *a quo* telah merupakan norma hukum (pidana) yang diadopsi dalam Undang-Undang *a quo* telah mengakomodasi heterogenitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Bahwa sepanjang pendapat hukum ahli Pemohon, Dr. Surastini, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak adalah hukum tidak tertulis berupa hukum adat atau kebiasaan sehingga dapat difatorkan untuk memperoleh kemungkinan seorang anak untuk dapat dijerat dengan tindak pidana sehingga bertentangan dengan asas pidana, "*Nulius delictum nulli poena sine praevia lege poenali*". Menurut Mahkamah, pendapat hukum tersebut adalah tidak tepat menurut hukum karena ketentuan *a quo* telah merupakan norma hukum (pidana) yang diadopsi dalam Undang-Undang *a quo* telah mengakomodasi heterogenitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Bahwa Mahkamah berpendapat norma hukum di Indonesia tidak dapat diklasifikasi hanya sebatas pada norma-norma hukum positif yang tertulis dalam Undang-Undang. Selain norma hukum yang telah ditetapkan dan ditulis oleh orang, berlaku pula norma hukum lain yang sejatinya telah mengantar dan berlaku secara kultural di tengah masyarakat Indonesia. Norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat inilah yang secara sosiologis dan historis lebih dahulu diakui oleh masyarakat Indonesia dengan ragam budaya yang dimilikinya.

Bahwa Mahkamah mengacu adanya norma hukum lain yang hidup dan mengikat di dalam masyarakat Indonesia, yakni norma hukum agama, norma hukum adat, dan norma hukum kebiasaan yang tidak semuanya diadopsi dalam hukum positif di Indonesia.

Bahwa alasan hukum dalam pokok permohonan adalah timbulnya relativitas dan ukuran yang tidak jelas dengan berlakunya pasal *a quo* yang pada akhirnya dapat dibuktikan melalui proses hukum di pengadilan. Penafian bahwa seorang anak dapat dikategorikan sebagai "Anak Naksal" bukan merupakan proses atau prosedur yang tepat diadopsi oleh setiap orang. Pemberian kategori "Anak Naksal" merupakan justifikasi yang dipati oleh masyarakat sebuah proses peradilan yang standarnya akan ditambah dan dibuktikan di muka hukum, sehingga pendapat para Pemohon mengenai hal diadopsinya asas legalitas dalam hukum pidana adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum;

[3.29] Menimbang bahwa sepanjang isu hukum tentang frasa, "...*sekurung-kurangnya 8 (delapan) tahun*...", pada Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan hanya berlaku jika proses penyidikan, penanganan, penuntutan, dan sidang anak, serta pemaparan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak sudah menjamin perlindungan hak-hak anak dan dengan

adanya frasa, "...*belum mencapai umur 8 (delapan) tahun*...", pada Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak agar dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan menyatakan inkonstitusional bersyarat dan hanya berlaku jika proses penyidikan anak sudah menjamin perlindungan hak-hak anak;

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa batas usia anak yang dibawa ke sidang anak adalah terlalu rendah, sehingga tidak memenuhi rasio keadilan dan juga melanggar hak konstitusional anak. Para Pemohon membandingkan batas usia tanggung jawab pidana anak dengan batas usia anak yang diberlakukan di sejumlah negara dan rekomendasi Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Anak, sehingga menunjukkan kesimpulan tentang batas usia anak yakni 12 tahun sebagai batas minimal usia tanggung jawab pidana anak yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan bahwa dalam Pasal 113 ayat (1) RUU KUHP telah dicantumkan batas usia anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa, "...*Belum mencapai umur 8 (delapan) tahun*..." adalah terlalu rendah karena terhadap anak dalam usia tersebut dapat dilakukan proses hukum "*pro justice*" oleh Penyidik. Para Pemohon menyatakan bahwa dalam kenyataannya para Penyidik tidak membedakan perlakuan dalam pemeriksaan penyidikan terhadap anak yang belum berusia 8 tahun. Para Pemohon juga menyatakan fakta hukum bahwa pelanggaran hak anak seperti kekerasan dan kondisi tidak nyaman dalam lingkup proses pemeriksaan untuk kepentingan "*pro justice*";

Bahwa para Pemohon mendalilkan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam proses pemeriksaan dan persidangan anak yang terdapat di Indonesia. Proses pemeriksaan dan persidangan bagi anak usia 8 tahun menurut para Pemohon telah menyebabkan kerugian konstitusional yang diterima oleh anak sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kesempatan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Bahwa ahli Pemohon, Fentiny Nugroho, M.A., Ph.D., memberikan bahwa batas usia anak 8 tahun sampai 16 tahun sangat rawan dikondisikan dalam karena pada inilah anak-anak tumbuh dan berkembang secara maksimal. Senada dengan pendapat ahli Pemohon tersebut, Dr. Surastini, S.H., M.H., menyatakan bahwa batas usia sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun terlalu rendah untuk diminta pertanggungjawaban pidana karena anak yang masih berusia 8 tahun masih sangat membutuhkan perlindungan. Adapun ahli Pemohon lainnya, Prof. Bismar Siragay, menyatakan bahwa anak usia 8 tahun belum dapat diminta tanggung jawab pidana dan orang tua yang lebih tepat bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Dalam perspektif hukum Islam, ahli Pemohon, H. Aisyah Amin, menyatakan bahwa anak yang belum akil baligh atau belum sempurna akalnya belum dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Adapun ahli Pemohon lainnya, Ad. Fahrudin, menyatakan bahwa dari tinjauan psikososial anak, maka usia 13 (tiga belas) tahun baru dapat dikenal pertanggungjawaban hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya.

Bahwa sebaliknya, dari keterangan ahli Pemeritah, Dr. Mudzakir, S.H., M.H., yang menyatakan meskipun Komite Hak-Hak Anak PBB telah merekomendasikan batas minimum pertanggungjawaban hukum anak, yakni 12 tahun, namun batas usia demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk menafikan konstitusionalitas batas usia pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak;

Bahwa dari dua pandangan hukum baik ahli Pemohon maupun ahli pemeritah, Mahkamah memandang batasan umur telah menimbulkan peluang penafian dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggungjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dengan berdasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak yaitu minimal bagi anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan. Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa batas usia Anak Naksal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan penyidikan, sedangkan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa apabila anak naksal belum mencukupi umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup maka terdapat anak naksal hanya dapat dijatuhkan tindakan seumur hidup. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak tidak dapat diajukan apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. Dari pengaturan hukum mengenai batas umur, baik dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan tersebut merupakan jenis dan materi muatan dari pertanggungjawaban hukum (pidana) yang seharusnya ketiganya mengandung kesesuaian karena jenis dan materinya sama sehingga harus konsisten sesuai dengan asas-asas hukum yang dituangkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Mahkamah berpendapat, batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk diajukan ke sidang dan belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dijadikan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual benar, umur *a quo* relatif rendah. Penjelasan Undang-Undang *a quo* menentukan batas umur 8 (delapan) tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis, anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Meskipun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menerapkan pula asas praduga tak bersalah, menurut Mahkamah, fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penanganan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap persidangan (*protection right*) dan hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*). Mahkamah berpendapat bahwa konvensi internasional, rekomendasi Hak-Hak Anak PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya batas umur 12 tahun dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan batas usia minimal bagi anak dalam pertanggungjawaban hukum. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa instrumen hukum internasional dan rekomendasi PBB tidak dapat dijadikan dasar uji *an sich* dalam menilai konstitusionalitas batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak;

Bahwa penetapan usia minimal 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak dalam tindak pidana sebagian besar negara-negara sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite Hak Anak PBB dalam *General Comment*, 10 Februari 2007, dengan batasan usia 12 (dua belas) tahun yang dapat tidak sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak. Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, penetapan batas umur tersebut sesuai dengan semangat revisi KUHP yang akan memberikan batasan usia yang lebih tinggi untuk menghindari adanya pelanggaran

konstitusional anak sebagaimana diadilkan para Pemohon yang sama dengan RUU Peradilan Anak yang memberikan batasan usia 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban hukum bagi anak;

Bahwa dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum (*minimum age floor*) bagi Anak Naksal (*delinquent child*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyatakan, "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Naksal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal *a quo* tidak dimintakan pengujian oleh para Pemohon, namun Pasal *a quo* merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.

Bahwa selanjutnya, menurut Mahkamah, bukan hanya Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang akan berpengaruh dengan dihapusnya frasa, "...*sekurung-kurangnya 8 (delapan) tahun*..." dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa "...*belum mencapai umur 8 (delapan) tahun*...", dalam UU Pengadilan Anak. Penghapusan frasa *a quo* ternyata juga secara *mutatis mutandis* mempengaruhi keberadaan frasa *a quo* pada pasal lainnya. Adapun menurut pemeritah Mahkamah, pasal lain yang akan turut terpengaruh adalah Pasal 1 angka 1 bagian Ketentuan Umum Yurisprudensi, "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Naksal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin"; dan penjelasan Undang-Undang *a quo* sepanjang terkait dengan batas umur 8 tahun;

Bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, "...*sekurung-kurangnya 8 (delapan) tahun*...", dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, "...*belum mencapai umur 8 (delapan) tahun*...", namun Mahkamah sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat prinsip-prinsip konstitusional yang diinstruksikan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma-norma pasal yang lain dalam Undang-Undang ini, yaitu Pasal 1 angka 1 dan penjelasan UU Pengadilan Anak sepanjang mengandung frasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Bahwa dalam perkara konstitusi yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang sesungguhnya tidak mengenai istilah putusan "*ultra petita*" (putusan melebihi yang diminta oleh Pemohon), namun karena Undang-Undang merupakan satu kesatuan sistem yang apabila sebagian pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka keseluruhan akan terpengaruh terhadap pasal-pasal lain yang tidak dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, berlaku pula terhadap Pasal 1 angka 1 serta penjelasan UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, "...*telah mencapai umur 8 (delapan) tahun*...", meskipun tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan;

Bahwa sebagai "*The Interpreter of Constitution*", Mahkamah dapat memberikan tafsir dalam penghapusan frasa "...*telah mencapai umur 8 (delapan) tahun*...", pada Pasal 1 angka 1, frasa "*sekurung-kurangnya 8 (delapan) tahun*...", pada Pasal 4 ayat (1) dan frasa, "...*belum mencapai umur 8 (delapan) tahun*...", pada Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak untuk selanjutnya hanya dapat dilaksanakan apabila difatorkan sesuai dengan batas umur minimum yang ditentukan oleh Mahkamah yakni 12 (dua belas) tahun;

[3.30] Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 22 UU Pengadilan Anak sepanjang frasa "...*pidana atau*...", bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa untuk menjamin diperlengkap hak-hak anak harus diadopsi pemberian tindakan daripada pemberian pidana;

Bahwa para Pemohon mendalilkan, Pasal 22 UU Pengadilan Anak mengenai pemberian pidana akan berdampak traumatik pada anak yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi proses perkembangan kejiwaan anak mengingat status mantan narapidana akan terus disandang oleh anak hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak;

Bahwa Pasal *a quo* tidak memberikan penekanan prioritas yakni upaya pemberian tindakan dan bukan pidana bagi anak sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kesempatan hukum bagi tumbuh kembang anak;

Bahwa dari keterangan ahli Pemohon (Dr. Surastini, S.H., M.H.) yang menyatakan Pasal 22 UU Pengadilan Anak mengenai penuntutan pidana bagi anak bukanlah suatu yang tepat karena tidak membantu dan melong anak untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Bahwa sebaliknya dari keterangan ahli Pemeritah yakni Dr. Mudzakir, S.H., M.H., yang memberikan penekanan pada proses pemberian pidana penjara kepada anak merupakan salah kebijakan hakim yang juga didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dalam menanggapi hukum yang berbeda.

Bahwa dari pandangan hukum kedua ahli di atas, Mahkamah dapat menerima keterangan ahli Pemeritah bahwa proses penuntutan dan pilihan mengenai pidana bagi anak sepenuhnya merupakan kewenangan bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara. Hal ini dikarenakan setiap perkara dan kasus memiliki pertimbangan dan tindakan hukum yang berbeda pada setiap alasan para Pemohon tidak tepat menurut hukum dan harus dikesampingkan.

[3.31] Menimbang bahwa para Pemohon juga memohon pada Mahkamah untuk mencabut frasa "*a. pidana penjara*...", pada Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak dengan alasan bahwa penuntutan pidana bagi anak merupakan pidana yang akan melanggar hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, hak atas makan, hak atas bebas dari kekerasan, hak atas kelompok dengan keluarga dan hak atas hukum berkeadilan. Pemohon mendalilkan bahwa pada persidangan di Indonesia tidak memiliki sejumlah permasalahan tersendiri yang telah terbukti tidak akan efektif untuk memberikan pendidikan kesadaran atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang anak.

Bahwa ahli Pemohon berpendapat bahwa keberadaan pasal *a quo* mengenai penuntutan pidana serta penuntutan pidana penjara bagi anak adalah suatu pilihan yang tidak tepat dan tidak membantu ataupun melong anak untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Bahwa Mahkamah dapat menerima keterangan ahli Pemeritah, Dr. Mudzakir, S.H., M.H., yang menerangkan pilihan penuntutan pidana penjara terhadap anak diserahkan kepada kebijakan hakim, sedangkan pembebasan perlakuan dan pidana tentunya didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak;

Dari pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak telah memberikan sejumlah alternatif pidana bagi anak naksal selain pidana penjara yakni pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Dalam hal ini, keberadaan pidana penjara bukan merupakan satu-satunya pilihan pidana bagi anak sehingga tidak secara mutlak dapat mengikat hak konstitusional anak. Keberadaan klausula pidana penjara merupakan bentuk pilihan yang keputusan akhirnya akan diserahkan pada hakim berdasarkan pertimbangan berat ringan tindakan pidana, kapasitas pribadi anak dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dengan melihat sejumlah prinsip keseimbangan antara kepentingan terak anak (*the best interest of child*) dan ketertarikan struktur sosial masyarakat;

Bahwa sepanjang mengungkap isu hukum berupa kasus-kasus kekerasan yang diterima oleh anak dalam penjara merupakan tindakan secara sistematis terdapat disebabkan berakutannya norma dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak. Mahkamah berpendapat, terjadinya kerugian yang dialami oleh anak dalam penjara bukan disebabkan berakutannya norma *a quo* melainkan dalam tataran implementasi bukan tataran konstitusional yang sama sekali secara mutlak tidak menyebabkan kerugian bagi semua anak yang tinggal dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak sehingga Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak adalah konstitusional;

[3.32] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa frasa, "...*di Lembaga Pemasyarakatan Anak*...", Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Anak dengan alasan bahwa penempatan anak naksal yang telah diputus oleh Hakim dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan "penempatan yang salah" atau "pemeriksaan yang keliru". Para Pemohon berpendapat bahwa anak tidak semestinya dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak seharusnya mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b UU Pengadilan Anak;

Sebaliknya atas dalil para Pemohon, Pemeritah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan ketentuan mengenai adanya Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan konsekuensi dari tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga harus ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Pemeritah memberikan keterangan bahwa pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah dalam rangka untuk melindungi anak dari perbuatan yang tidak baik, dibandingkan bila anak tersebut berada di luar Lembaga Pemasyarakatan;

Ditambah itu Pemeritah juga telah menguji adanya permasalahan seperti pelanggaran hukum yang diterima oleh anak selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hal tersebut disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana maupun belum maksimalnya tingkat profesionalitas petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, Pemeritah mengacu juga telah melakukan upaya perbaikan dalam penanganan dan pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak;

Bahwa Mahkamah berpendapat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan penguatan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kehadiran aparat penegak hukum untuk tidak memperlakukan anak naksal yang dinyatakan bersalah di Lembaga Pemasyarakatan bagi orang dewasa. Keberadaan Pasal *a quo* telah mempertegas keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai wadah pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja bagi Anak Naksal yang diputus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak;

Bahwa pada prinsipnya permasalahan-permasalahan yang diadilkan oleh para Pemohon mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan permasalahan yang timbul karena penerapan hukum yang salah oleh aparat penegak hukum dan bukan disebabkan adanya norma yang bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak berdasar hukum;

[3.31] Menimbang bahwa dari rangkaian pendapat Mahkamah di atas dalam kaitannya yang satu dengan yang lain para Pemohon tidak dapat membuktikan dari-dalil pemohonannya, maka frasa-frasa yang dimohonkan oleh Pemohon yakni yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak terbukti menurut hukum, sedangkan di Pemohon mengenai Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak beralasan hukum;

4. KONSELUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Mahkamah membenarkan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam perkara *a quo*;

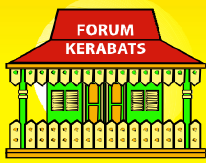
[4.3] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan terbukti menurut hukum untuk sebagian;

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan frasa, "...*8 (delapan) tahun*...", dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...*8 (delapan) tahun*...", adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...*12 (dua belas) tahun*...";
- Menyatakan frasa, "...*8 (delapan) tahun*...", dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...*8 (delapan) tahun*...", tidak mempunyai kekuatan hukum



**Keluarga Besar
Tangerang Selatan**

FORUM KERABATS (Keluarga Besar Tangerang Selatan)

Mengajak Masyarakat Tangsel
datang ke **TPS** mensukseskan **PSU**
(Pemilihan Suara Ulang)

Minggu, 27 Februari 2011

Gunakan hak pilih Anda secara cerdas & bertanggung jawab. Pilih Walikota yang **kompeten**, merakyat, dekat dengan banyak kalangan, dan **bermoral baik**.

Kompeten, Artinya:

1. Punya pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang berbagai bidang, misalnya pemerintahan, hukum, sosial kemasyarakatan, pendidikan.
2. Punya pengetahuan dan keahlian dalam menemukan berbagai sumber dan potensi untuk mengatasi masalah masyarakat.
3. Memiliki jaringan yang luas untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan.
4. Punya pengalaman dan kecakapan memimpin berbagai kegiatan dan organisasi.

Bermoral Baik, Artinya:

1. Kehidupan beragama yang baik.
2. Senang membantu, bekerjasama untuk kemaslahatan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Sukseskan PSU : Awasi pelaksanaannya, amankan hasilnya!

Forum Kerabats | Margiono, Ketua Umum | Drs H Zarkasih Noor, Ketua Dewan Pembina



BAASYIR di PN Jaksel, kemarin.

Serang Amerika Dan Australia Eksepsi Baasyir Penuh Air Mata

Terdakwa Abu Bakar Baasyir kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atas dugaan pelanggaran terorisme. Dalam pembacaan eksepsi pribadinya setebal 90 halaman, sesekali Pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) ini, menitikkan air mata. Beberapa pendukung Baasyir ikut menangis sambil menundukkan kepala.

BAASYIR menjelaskan tentang pelatihan militer di Aceh yang disebutnya sebagai 'dad'. 'Dad' itu dilakukan untuk meningkatkan musuh-musuh Islam dan tujuannya bukan untuk membunuh.

"Saya meyakini berdasarkan dalil-dalil syar'i bahwa latihan fisik dan senjata di pegunungan Aceh adalah amal ibadah untuk menanti perintah Allah, agar umat Islam mendapatkan 'dad' atau mempersiapkan kekuatan fisik dan senjata," kata Baasyir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Baasyir berdalil, pelatihan ini dilakukan di daerah pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk. Bahkan, penduduk sekitar Pegunungan Jatin Jambon memahami bahwa pelatihan tersebut sebagai

ibadah. "Bukinya ada yang membantu memberi makanan," ujar pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo ini.

Baasyir menanti, upaya penangkapan terhadap dirinya merupakan pesanan dari Amerika Serikat.

"Saya pun tidak lepas dari incaran makar terkuat ini. Ketika saya kembali dari hijrah di Malaysia, Fir'aun Amerika menuduh saya sebagai tokoh Al Qaidah yang harus dilynai di Indonesia," katanya. Ia mengatakan, Amerika berniat menjebloskannya ke dalam penjara sejak pertama kali kembali dari Malaysia.

Menurut Baasyir, Duta Besar AS saat itu meminta Megawati (saat itu menjadi Presiden) mengekstradisi dirinya untuk dipenjarakan di

Guantanamo. Namun ia bersikuk karena permintaan tersebut ditolak Megawati.

Selanjutnya, Baasyir mengaku dituntut pemerintahan Amrozi, es. melakukan pembunuhan di Bali (Bom Bali II).

Menurut Baasyir, polisi memaksa tiga pelaku pembunuhan, Amrozi, Mukhlis, dan Imam Samudra, untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang telah direkasaya.

"Tujuan dari rekayasa ini adalah agar saya dihukum mati," jelasnya. Dalam kasus itu, Baasyir hanya dinyatakan bersalah dengan tuduhan memberikan keterangan palsu soal imigrasi dan dihukum satu setengah tahun penjara.

"Fraud Amerika marah dan memerintahkan polisi agar mencari-cari alasan agar saya tetap dipenjara terus, jangan dibebaskan," katanya.

Baasyir juga menuding Australia telah memberikan dana ke Denis 88 untuk menangkap dirinya.

Tim Pengacara Muslim (TPM) yang membela Baasyir, juga menuding, perkara

yang ditundukkan kepada kliennya merupakan hasil rekayasa pemerintah Amerika Serikat. Rekayasa ini terjadi berkali-kali.

"Kenyataan ini memberi inspirasi kepada kami untuk memberi judul dari nota keberatan ini Deja Vu, persidangan dengan tuduhan klasik," kata anggota TPM, M Assegaf.

TPM membeberkan beberapa bukti keterlibatan asing dalam rekayasa ini. Di antaranya, Baasyir dituding akan melakukan makar dan merencanakan pembunuhan di Padri Cafe di Bali dengan berdasarkan pengakuan Umar Al Faruq. Kesaksian Umar Al Faruq yang ditahan oleh Amerika ini menurut TPM, sebenarnya hanya berisi "Yes" dan "No". ■ KAL

Jubir KPK Johan Budi:

Pelimpahan Berkas Nggak Terhambat Keterangan Mega

MENYIKAPI berita *Rakyat Merdeka* edisi Kamis (24/2)

berjudul "Kasus Miranda Terancam Mogok", Jubir Bicara KPK Johan Budi menyampaikan klarifikasi, kemarin.

"Saya ingin meluruskan beberapa hal berkaitan dengan isi berita, karena ada beberapa hal yang tidak akurat yang perlu diluruskan, agar pembaca tidak salah persepsi dan memahami persoalan secara utuh dan benar," tuk Johan.

Beberapa hal yang diluruskan itu adalah, "Saya selaku Jubir Bicara KPK, tidak pernah memberikan pernyataan atau statemen yang menyebarkan, penyidik belum bisa melimpahkan berkas perkara ke pengadilan karena belum memuat keterangan Ibu Megawati," kata Johan.

Johan menceritakan isi konferensi pers di Gedung KPK saat ditanya wartawan berkaitan dengan pemanggilan Megawati.

"Kami menjelaskan, status pemanggilan Ibu Megawati adalah sebagai saksi yang diminta atau mengemukakan atas permintaan terdakwa sesuai dengan KUHP pasal 65," tegasnya.

KPK, jelas Johan, hanya melaksanakan ketentuan KUHP tersebut dan menyerahkan sepenuhnya pada saksi, apakah bersedia memenuhi permintaan tersebut atau tidak.

"Dalam konteks melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan penerimaan TC, sejumlah mantan anggota DPR tahun 2003-2004, KPK tidak berkepentingan dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan Ibu Megawati. Jadi sama sekali tidak benar bahwa pelimpahan berkas perkara ke pengadilan terhambat karena tidak ada keterangan Ibu Megawati," tegasnya. ■ JON



TERIMA DIPO: Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono (kiri) dan anggota Dewan Pers lainnya, saat berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam (kanan) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, kemarin. Diskusi membahas ancaman Dipo soal pemblokiran dua media televisi dan satu media cetak.

Pakai Seragam Kabarekrim Susno Duadji Merayu Hakim

SUKA dan duka mampir bersamaan ke Susno Duadji. Kemarin, untuk pertama kalinya dianggotai oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Susno karena cunnya berulung tahun. Tapi terpaksa harus tetap duduk di kursi pesakit Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang Susno masuk agenda penting. Pembacaan pledoi (pembelaan) sebagai terdakwa kasus PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan pemolongan dana Pilkada Jawa Barat.

"Proses peradilan saya sudah berlangsung lebih dari 9 bulan sejak ditahan dan ditangkap 16 Mei 2010 bertepatan dengan ulang tahun saya, hingga hari ini bertepatan dengan kelahiran cucu saya. Hampir 10 bulan kami sekeluarga mengalami penderitaan lahir dan batin, dipisahkan dari keluarga dan dihentikan hak-hak yang semestinya saya peroleh," kata Susno mengawali pembacaan pledoinya.

Yang menarik, kali ini Susno yang biasa memakai baju putih, memilih berseragam saat dirinya masih menjadi Kabarekrim. Bintang tiga di pundaknya terlihat terang. Hadir istri Susno, Herawati dan putrinya Indira Tanti.

Tak tampak kesedihan dari wajah Susno, sesekali terdengar canda tawa keluar dari mulut Susno saat menyampaikan kekesalan atas kesaksian Sjahlil Djohan dan Maman Abdulrachman.

"Sjahlil Djohan menerangkan pada tanggal 4 Desember 2008 menemui saya di rumah Jalan Abusir No. 2B, Jaksel. Temyata di persidangan perkara ini terungkap tidak ada seorang saksi pun baik pengawal, sopir maupun pembantu yang melihat kedatangan Sjahlil Djohan," kata Susno.

Susno bertanya-tanya dari pintu mana Sjahlil masuk dan keluar rumahnya. "Apakah karena tanggal 4 Desember 2008 itu adalah malam Jumat dan mungkin Jumat Kliwon, dimana orang yang punya ilmu kesakitan sedang uji coba ilmunya?" kesal Susno ditringi tawa peserta sidang.

Susno juga mengungkap pertemuan Sjahlil Djohan dengan AKBP Syamsurizal Mokoagow di rumahnya. Menurutnya, tidak mungkin ada pertemuan tersebut sebab Syamsurizal datang menghadap pada Sabtu, 27 Desember 2008, sementara Sjahlil 4 Desember.

Sementara dalam perkara korupsi Pilkada Jawa Barat, Susno membantah telah memerintahkan bekas anak buahnya, Maman Abdulrachman untuk melakukan pemolongan Dana Hibah Pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno menyebut, karena bertentangan dengan kebijakannya selaku Kapolda.

Di akhir nota pembelaannya, Susno berantun. "Udang lalu suu di mata, Jati mampai bersai putih. Orang yang selalu memusu fakta, pasti mendapatkan azab yang perih," kata Susno ditringi tepuk tangan riuh hadirin.

Herawati, istri Susno, mengatakan, paksaan dinas lengkap yang dikenakan Susno adalah yang masih sering digunakannya saat menjabat Kabarekrim. "Alhamdulillah masih kuat," timpal Indira, anak Susno, yang duduk berdampingan dengan Herawati.

Perlu diketahui, JPU menuntut Susno 7 tahun kurungan ditambah denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan penjara. Susno juga diharuskan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 8,5 miliar. ■ KAL

Harian Rakyat Merdeka adalah perusahaan media nasional di Indonesia. Dalam rangka mengembangkan bisnis dan usaha Divisi Iklan, kami mengundang orang-orang muda, berbakat dan termotivasi untuk bergabung dengan tim kami sebagai :

Urgently Required!

Account Executive (AE)

Requirements:

- Pendidikan minimal S1
- IPK minimal 3.00
- Usia Max 29 Th, diutamakan masih lajang
- Berpengalaman menarik
- Fresh Graduate, namun diutamakan yang sudah memiliki pengalaman di bidang penjualan dan pemasaran
- Menyukai kegiatan sales dan marketing, memiliki keinginan untuk berprestasi dan berorientasi pada hasil
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dan presentasi yang baik
- Mudah bergaul, disiplin tinggi, inisiatif, dan pekerja keras

Fasilitas:

- Gaji Pokok
- Bonus dan Komisi yang menarik
- Jenjang Karier
- Tunjangan Kesehatan & Hari Raya
- Training & Workshop Marketing Media

Kandidat diharapkan mengirimkan CV, foto terbaru sebelum bulan Maret 2011 ke :

SDM Rakyat Merdeka Group
(u.p) **Ibu Firsy Hestiyani**
Gedung Graha Pena Lantai 8
Jl. Raya Kebayoran Lama No.12
Jakarta Selatan 12210

Ditunggu selamatnya tanggal 29 Februari 2011

Valuta Asing

| MATA UANG | JUAL | BELI |
|-----------|----------|----------|
| USD | 8000.00 | 8750.00 |
| SGD | 7045.85 | 6822.85 |
| HKD | 1155.50 | 1121.50 |
| CHF | 9740.05 | 9439.05 |
| GBP | 14592.30 | 14135.30 |
| AUD | 9057.50 | 8771.50 |
| JPY | 110.48 | 106.36 |
| SEK | 1418.75 | 1366.25 |
| DKK | 1677.50 | 1612.50 |
| CAD | 9158.25 | 8857.25 |
| EUR | 12415.85 | 12043.85 |

Pasar Global

| INDEX | NILAI | +/- |
|----------------|-----------|-------|
| JCI | 3,439.13 | -1.00 |
| All Ordinaries | 4,901.10 | -0.69 |
| Hang Seng | 22,601.00 | -1.34 |
| Nikkei 225 | 10,452.70 | -1.19 |
| Dow Jones | 12,105.80 | -0.88 |

Market Review

Penjualan Mesin Cuci Sharp Naik 20 Persen

TAHUN ini, PT Sharp Electronic Indonesia (SEID) memasang target penjualan mesin cuci sebesar 482.200 unit. Angka tersebut naik 20 persen dibandingkan target penjualan tahun lalu yang mencapai 370.000 unit. Berdasarkan hasil survei *Electronic Market Club* (EMC), pangsa pasar elektronik Indonesia tahun 2011 menempatkan mesin cuci pada urutan kelima setelah kulkas, LCD TV, AC dan CRT TV (TV layar lebar).

Produk kulkas memimpin pangsa pasar elektronik sebesar 22 persen, LCD TV sebesar 17,7 persen, AC sebesar 17,2 persen, CRT TV sebesar 12,6 persen. Sementara pangsa pasar mesin cuci masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar 10,1 persen.

"Selang tahun pangsa pasar elektronik di Jepang tahun 2011 akan didominasi produk PC, yaitu sebesar 17,6 persen. Selanjutnya, HP dan LCD yang masing-masing sebesar 16,7 dan 12,2 persen. Terakhir, produk AC sebesar 6,8 persen," ujar President Director PT Sharp Electronic Indonesia Fumihito Irie. Sharp telah berhasil menjadi *market leader* (pemimpin pasar) untuk jenis mesin cuci dua tabung (*twinn tub*) karena lebih hemat listrik maupun air sehingga pangsa pasarnya paling besar. "Namun mulai tahun ini, kami akan fokus pada mesin cuci jenis *fully auto* (satu tabung di atas)," jelas Product Manager PT Sharp Electronics Indonesia Melianty.

Menurut Melianty, total penjualan mesin cuci untuk semua jenis yaitu *twinn tub*, *fully auto* dan *front loading* (pemutar dibagian depan) tahun lalu mencapai 370.000 unit. Sementara tahun ini kami targetkan 20 persen menjadi 484.200 unit.

Ia mengatakan, dari target penjualan sebesar 484.200 pada tahun ini, diharapkan bisa menjual jenis *fully auto* sebanyak 96.000 unit. Angka ini naik dari tahun lalu yang berhasil mencatat penjualan sebesar 50.000 unit. ■ DPA

Labo Indo Tambangraya Nyungsep 39 Persen

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mengalami penurunan laba bersih sebesar 39,15 persen dari 335,551 juta dolar AS di 2009 menjadi hanya 204,151 juta dolar di tahun 2010.

Seperti dikutip dari laporan keuangan perseroan di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin, nyungsepnya laba itu menggenus laba bersih per saham perseroan menjadi hanya 0,18 dolar AS per lembar saham di 2010 dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama 0,3 dolar AS per lembar.

Meski laba bersihnya turun, namun penjualan perseroan di 2010 naik tipis dari 1,508 miliar dolar AS di 2009 menjadi 1,668 miliar dolar AS. Sementara kewajiban perseroan berkurang, dari 411,985 juta dolar AS tahun 2009 menjadi 368,682 juta dolar AS.

Perseroan mencatat penurunan aset dari 1,198 miliar dolar AS menjadi 1,089 miliar dolar AS pada 2010. Selama setahun penuh, harga saham perseroan sudah tumbuh 46,35 persen dari Rp 32.050 di awal tahun 2010 menjadi Rp 46.900 di penghujung tahun.

Pada perdagangan kemarin, hingga pukul 10.10 waktu JATS, saham ITMG berada di level Rp 47.850 per lembar saham, melemah Rp 750 per lembar atau setara 1,54 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya. ■ DPA

Kualitasnya Nyata

ht MOBILE

SENSE FS

12

COMMUNICATE WITH HEART

Dapatkan info lebih lanjut:

(021)60219577 (021)600044 (021)6304943 (021)6304047 (021)63857085 (021)70750838 (021)63857868 (021)63857222

www.ht-mobile.co.id

Rakyat Merdeka

PROBISNIS

Orang Bisnis Baca Probis

REDAKSI & KILAN BECUNG RAKYAT MERDEKA, JL. KEMAYUTAN LAMA NO. 12, JAKARTA SELATAN 12210, TELP.: (021)3695937, FAX: (021)3691715, EMAIL: probisnis@rkm.com

Libya Memanas, WIKA Stop Proyek Mall 158 Miliar

Krisis politik di Libya yang semakin memanas, mulai mengimbas ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Wijaya Karya (WIKA) terpaksa menghentikan proyek senilai 17,6 juta dolar AS di negeri petro dolar tersebut.

CORPORATE Secretary Wijaya Karya Natal Argawan Pardeede mengutarakan, kondisi politik di Libya saat ini sangat merisankan investor. Dia menyebutkan, proyek WIKA dalam penggarapan *interior shopping mall* di Kufri senilai 17,6 juta dolar AS atau sekitar Rp 158,4 miliar ikut terganggu.

"Pastinya mempengaruhi karena kita nggak bisa kerja. Yang kita lakukan sekarang mengawal proyek dari sana dulu yang jumlahnya sekitar 200 orang. Kita sudah mengomong ke pemberi kerja kita bahwa kondisi seperti ini (konflik, red) kita nggak bisa kerja," ujar Natal kepada *Rakyat Merdeka* di Jakarta, kemarin.

Dia berharap, setelah kondisi Libya pulih, pihaknya akan melanjutkan proyek tersebut. "Jadi sekarang berhenti dulu dan kita akan bicarakan lagi dengan Solar Sahara Investment karena kita *joint operation* dengan mereka," terang Natal.

Dia menjelaskan, proyek *shopping mall* ini dimulai sejak tahun lalu. Targetnya, bulan Juni ini kelar. Tapi dengan kondisi politik Libya saat ini, proyek tersebut bakal molor dari target.

Meski demikian, pihaknya belum merevisi target tersebut, karena belum ada pembicaraan

lebih lanjut dengan perusahaan di Negeri Muammar Khadaifi ini.

Dakui, proyek *interior shopping mall* ini merupakan proyek pertama WIKA di Libya. Dalam proyek ini, perseroan hanya sebagai *project management* service dan tidak mempunyai aset di Libya. Hal ini demi mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak terduga seperti saat ini. "Jadi kita akan lebih mudah untuk mengendalikannya," kata amuk buah Bintang Perbowo itu.

Selain WIKA, sejumlah perusahaan minyak pun sudah mengumumkan rencana evaluasi

para pekerjaannya yang bekerja di Libya. Misalnya, Medco. Direktur PT Medco Energi Internasional Lukman Mahfudz mengatakan, akibat krisis politik dan keamanan di Libya, perseroan menghentikan kegiatan pengeboran di sumur E 4 yang baru saja didapat Medco tahun ini.

Seperti diketahui, kondisi politik dan keamanan di Libya terus melambung. Pada perdagangan Rabu (23/2) di pasar Asia, minyak *light sweet* pengiriman April kembali naik 4 sen menjadi 95,46 dolar AS per barel. ■ DIN



BERDAMPINGAN: Waki Ketua Umum Kadin Bidang Moneter dan Fiskal Haryadi B. Sukandari (kanan) bersama Waki Ketua Komite Tetap Perjanjian M. Ridwan memberikan keterangan pers terkait kesepakatan pajak akan dikenakan pajak yang diselesaikan di luar sistem perpajakan di Jakarta, kemarin. Model penyelesaian ini juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Harga Properti Di Asia Dinilai Paling Murah Bangun Rumah Sakit, Aset

LIPPO Karawaci terus mengentot bisnis kesehatan seperti pendirian rumah sakit baru. Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) Ketut Budi Wijaya menyebutkan, pendanaan dari divisi *hospital* naik 16 persen menjadi Rp 1,037 triliun.

Selangkan bisnis *commercial* mencatat peningkatan pendapatan 14 persen menjadi Rp 354 miliar. Dengan kondisi tersebut, pihaknya berani memberikan dividen Rp 150 miliar.

"Gambarnya lengkapnya terlihat sangat mengembikan dan saya ingin para pemegang kepentingan tahu bahwa kami memiliki keyakinan untuk memanfaatkan momentum kuatnya penjualan perumahan dan bisnis rumah sakit," ujar Ketut saat menjelaskan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) di Jakarta, kemarin.

"Saya sangat antusias dan berharap untuk dapat lebih mendorong strategi pertumbuhan kami

dalam rangka mengubah LPKR dari suatu grup properti dengan nilai 3 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS (Rp 72 triliun)," imbuh Ketut.

Menurutnya, Lippo Karawaci akan membayar dividen final sebesar Rp 150 miliar, yang merupakan *payout ratio* sebesar 25,6 persen, atau setara dengan *yield* 1,6 persen. "Kami terus berkomitmen untuk melanjutkan tradisi ini, sejalan dengan gerak maju kami dengan strategi pertumbuhan dan meningkatkan tingkat keuntungan kami," jelasnya.

Pada RUPS ini, para pemegang saham menyetujui penunjukan dewan komisaris, komisaris independen dan direksi. Tidak ada pemunculan anggota dewan komisaris baru. Roberto Feliciano dan Ivan Setiawan Budono ditugaskan sebagai anggota direksi baru.

Dalam RUPS tersebut, para pemegang saham menyetujui laporan tahunan

Daihatsu Bangun Pabrik Di Karawang Senilai Rp 2,1 Triliun

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) terus berusaha meningkatkan produksinya dengan membangun pabrik baru di kawasan industri Suryajaya, Karawang Timur, Jawa Barat. Nilai investasinya Rp 2,1 triliun.

Melalui pabrik baru ini, Daihatsu akan menambah kapasitas produksi ADM menjadi 450.000 unit per tahun. Kapasitas ini meningkat dari sebelumnya yang sebesar 350.000 unit per tahun. Dalam 5 tahun terakhir, produksi ADM meningkat tajam sebesar 315 persen. Tahun 2006, produksi tercatat 95.496 unit dan menjadi 300.373 unit pada tahun 2010.

"Pabrik ini akan dibangun dengan luas area sekitar 800.000 meter per segi (80 hektare). Dengan berdirinya pabrik ini, diharapkan bisa mencapai kapasitas produksi 100.000 unit per tahun. Pabrik ini akan digunakan untuk memproduksi mobil mencakup proses *stamping*, *welding*, *painting* dan *assembly*. Pabrik ini akan beroperasi tahun 2012," jelas Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Sudirman MR di Jakarta, kemarin.

Menurut Sudirman, pihaknya

menargetkan penjualan menjadi 125.000 unit pada tahun ini. Angka itu naik tipis dari penjualan tahun lalu sebanyak 115.000 unit. Dari segi pangsa pasar, 70 persen masih terfokus di Pulau Jawa.

Menurutnya, 49 persen pangsa pasar Daihatsu ada di Jakarta dan 70 persen di Jawa. Pasar mobil akan berkembang signifikan jika pendapatan kotor negara (GDP) suatu negara sudah di atas 3.000 dolar AS. GDP Indonesia saat ini sudah mencapai 3.000 dolar AS. Meskipun pasar mobil China menjadi yang nomor satu di dunia, tapi pasar Indonesia tetap potensial. "Tahun ini, kami akan meng ekspor 12-15 persen kendaraan. Sisanya sekitar 85 persen untuk dalam negeri," ujarnya.

Dikatakan, penjualan pada Januari mengalami penurunan dibandingkan Desember 2010, terutama penjualan di Jawa Timur yang turun 10 persen.

Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor Ananta Tjandra menambahkan, tahun ini pihaknya tidak akan menaikkan harga mobil karena konsumen sudah terbelah paku. ■ DPA



PENCET TOMBOL: Senior Automation Consultant Bernd Lieberth (kanan) bersama AS Product and Solution Manager Adi Purnomo Soepama saat meluncurkan *Totally Integrated Automation Portal* (TIA Portal) di Jakarta, kemarin.

Kolom Probis

Minim Fokus Dalam Penanganan Krisis Pangan

Oleh: Bambang Soesatyo

Wakil Ketua Kadin/Anggota DPR

PERMINTAH benar-benar kehilangan fokus dalam penanganan kebutuhan pangan. Hingga pekan ketiga Februari 2011 ini, dua Instruksi Presiden (Inpres) tentang penanganan pangan 2011 yang pernah diumumkan belum juga diterbitkan.

Lambannya penerbitaan dua Inpres itu bisa merusak strategi dan realisasi penanganan pangan. Stok bahan pangan bisa saja tidak pada level yang aman. Akibatnya, akan terjadi lagi spekulasi harga pangan yang akan mengancam rakyat.

Apalagi, produksi padi di tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan. Gagal panen di Jawa, Sumatera dan daerah lain me-

nyebabkan produksi padi awal 2011 turun sekitar 30 persen.

Di pekan pertama Januari 2011, Menteri Perencanaan Hatta Rajasa mengatakan, penyusunan dua Inpres itu diselesaikan Januari lalu. Dua Inpres tentang fleksibilitas Bulog dan Menteri Pertanian merespons perubahan iklim yang menyebabkan perubahan musim tanam, serangan hama atau kerusakan lahan pertanian.

Menteri Pertanian berwenang memberikan kebijakan pembagian benih lebih awal, termasuk memiliki dua cadangan.

Inpres kedua tentang fungsi Bulog. Yakni, Bulog punya fleksibilitas memasok dan membeli

beras petani. Bulog bisa membeli beras dengan harga komersial dan bisa melepas beras kualitas premium.

Tujuan utama dua Inpres itu adalah menguatkan dan mengamankan stok pangan, sekaligus mencegah gejolak harga. Ditegaskan maraknya isu krisis pangan, dua Inpres itu mungkin bisa bermanfaat jika diimplementasikan dengan benar dan tepat. Minimal bisa mengurangi ketegangan kita pada beras impor. ■

Festival Sate Nusantara

Tajanan Sate Terbesar...

Cooming Soon

Maret 2011

Info pendaftaran stand sate : 021-53654205 (ext. 206)

Rakyat Merdeka LAMPU HILAU NONSTOP TANGSEL POS SATURDAY NEWS

SUKU BUNGA DEPOÓSITO

[illegible]

Wacana kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (Bi rate) hingga di atas 50 basis poin (bps) diyakini bisa mengganggu penyaluran KUR. Pemerintah pun berharap Bi rate bisa diturunkan lagi.

MENTERI Koperasi dan UKM Syarif Hasan menjelaskan, dengan kenaikan BI rate 25 bps sejak Januari 2011, belum ada pengaruh terhadap penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat). "Saya cenderung melihatnya begitu. Kemarin kan baru naik 25 bps, kalau naik lagi 25 bps lagi saya pikir masih belum memengaruhi penyaluran KUR," yakin Menkop kepada *Kompas.com* di Jakarta, Rabu (23/2/2012).

Namun keyakinan ini tampaknya tidak berlaku jika kenaikan BI rate di atas 50 bps. Ia memprediksi, penyaluran KUR akan terpengaruh bila benar BI rate bertengger di atas 7,25 bps. "Tapi intinya kita mau BI rate turun, bukan naik lagi," harapnya.

Seperti diberitakan, 4 Januari lalu Rapat Deputi Gubernur E memutuskan menaikkan BI rate

Khawatir Pengaruhi Penyaluran KUR

Menkop Desak BI Rate Turun Lagi

menjadi 6,75 persen dari 6,50 persen. Namun karena ada desakan untuk menurunkan inflasi ini dari 4,1 persen menjadi 3,1 persen, dikhawatirkan akan kembali mengerek suku bunga acuan hingga di atas 50 bps.

Terhadap upaya BI mendorong penguatan likuiditas perbankan dengan menaikkan modal minimum, sesuai ketentuan Basel III, Menkop mengapresiasi.

"Dengan modal yang kuat, harusnya bank makin agresif menyalurkan kredit. Saya berharap itu tidak mempengaruhi biaya pinjaman KUR, karena saat ini program KUR sudah mulai menyebar ke daerah-daerah yang termarginalkan," ujar menteri



Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan

Sebelumnya, Deputy Gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan Halim Alamsyah menyatakan, dengan modal minimum Rp 100 miliar, bank memiliki ke-



ampunan terbesar untuk meny-
rkan kredit.

"Kalau misalnya ada bank
ang kreditanya tumbuh 15 per-
sen saja, maka modal dia (yang
nya Rp 100 miliar) akan ter-

gerus cepat," kata Halim.

Namun, sampai saat ini belum ada angka pasti berapa modal minimum akan dinaikkan. Tetapi Halim mengisyaratkan, modal minimum Rp 125 miliar masih dirasa kurang.

Komis XI DPR akan meminta pertanggungjawaban BI untuk menjelaskan alasan dibalik kenaikan BI rate, juga dampak-dampak yang mungkin terjadi oleh kenaikan BI rate.

Anggota Komisi XI DPR dari Golkar Nuston Wahid malah mempertanyakan, kapan BI rate bisa digiring kembali turun ke level yang lebih rendah. "Kami ingin tanya kepada Gubernur BI, kapan BI rate akan kembali turun," tanya Nuston. ■ RAN

Cash Today

SLF Indonesia Raup
Premi Rp 779 Miliar

PT Sun Life Financial (SLF) Indonesia berhasil mencatat peningkatan kinerja keuangan yang signifikan. Pada kuartal IV-2016, pendapatan premi tercatat Rp 779 miliar atau naik 18 persen dibanding periode yang sama tahun 2009 sebesar Rp 660,7 miliar.

Menurut siaran pers SLF Indonesia yang dikirim kepada *Rakyat Merdeka*, kenaikan premi itu disokong pendapatan premi bisnis baru yang naik 35 persen pada kuartal IV-2010 menjadi Rp 387,4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, serta pendapatan premi syariah per Desember 2010 yang mencapai Rp 1,61 miliar.

Per Desember 2010, total aset SLF Indonesia juga mengalami kenaikan 20 persen menjadi Rp 4,45 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan SLF Indonesia meraih untung diyakini lantaran perusahaan tersebut memiliki *Risk Based Capital (RBC)* yang kuat, yakni sebesar 304 persen per Desember 2019. Persentase RBC itu merupakan salah satu yang tertinggi di industri, dibandingkan dengan kebutuhan pemerintah sebesar 120 persen.

Untuk mendukung bisnisnya, SLF Indonesia menyediakan berbagai produk asuransi yang dikembangkan sesuai kebutuhan, seperti produk *Brilliance*. *Brilliance* merupakan sebuah produk asuransi jiwa yang menggabungkan perlindungan asuransi jiwa dan investasi. Selain itu ada pula *Brilliance High Watermark Plus*, produk unit link baru SLF Indonesia yang dikelola dengan metode manajemen investasi yang inovatif (*High Watermark*).

Khusus untuk Sun Life Syariah, SLF Indonesia menawarkan dua produk *unit link* Sya-

Untuk mendukung bisnisnya, SLF Indonesia menyediakan berbagai produk asuransi yang dikembangkan sesuai kebutuhan, seperti produk *Brilliance*.

riah yakni *Brilliance Hasanah Protection Plus* dengan pembayaran premi tunggal, dan *Brilliance Hasanah Sejahtera* dengan pembayaran premi berkala.

Produk-produk tersebut bisa ditawarkan baik melalui saluran agen dan saluran distribusi alternatif, seperti *bancassuranc* (kerja sama dengan bank).

SLE Indonesia juga menyelenggarakan program pelatihan khusus syariah dan sertifikasi untuk seluruh tenaga pemasarannya. Program tersebut dikembangkan secara internal oleh perusahaan bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah, berdasarkan prinsip syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN).

Sekadar informasi, jika digabung dengan kinerja keuangan CIMB Sun Life yang berfokus menyediakan produk bagi para nasabah CIMB Niaga, total premi SLF Indonesia dan CIMB Sun Life (keduanya masuk dalam grup SLF) sampai kuartal IV-2016 mencapai Rp 1,969 triliun dengan pendapatan bisnis baru sebesar Rp 675,6 miliar.

Jumlah aktiva sebesar Rp 4,1 triliun, dengan nasabah mencapai 1 juta jiwa. ■ RAN/MLF

MEJENG BARENG: Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faiz Zairi (kiri) dan Direktur Utama BNI Gatot M. Suwanda menandatangani nota kesepahaman (NOU) di kantor Wakil Presiden Jakarta, Kanis (24/2). BNI mendukung program pemeliharaan melalui Kementerian Pemandangan Daerah Tertinggal (PDT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan usaha kecil dan menengah di daerah tertinggal.

[illegible][illegible][illegible]

24 FEBRUARI, 2011

LAPORAN TRANSAKSI OBLIGASI
GOVERNMENT BOND[illegible]

CORPORATE BOARD

| Band ID | Req | BSG DR | DR | Ta | Yn | High | Low | last |
|----------|-------------|--------|--------|--------|------|----------|----------|----------|
| 42P1515 | 22 Aug 2011 | 1 | 3.000 | 0.000 | Ones | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 |
| 4P1515M | 22 Aug 2011 | 2 | 14.500 | 14.500 | Ones | 0.023333 | 0.020000 | 14.50000 |
| 42P1515M | 22 Aug 2011 | 3 | 0.000 | 0.000 | Ones | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 42P1515M | 11 Jul 2011 | 1 | 0.000 | 0.000 | Ones | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 42P1515M | 11 Jul 2011 | 2 | 0.000 | 0.000 | Ones | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 42P1515M | 11 Jul 2011 | 3 | 0.000 | 0.000 | Ones | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 42P1515M | 10 Aug 2011 | 1 | 2.200 | 0.000 | Ones | 0.00000 | 0.00000 | 2.20000 |
| 42P1515M | 29 Dec 2011 | 1 | 2.200 | 2.000 | Ones | 0.00000 | 0.020000 | 2.00000 |
| 42P1515M | 29 Dec 2011 | 2 | 0.000 | 0.000 | Ones | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 42P1515M | 29 Dec 2011 | 3 | 20.000 | 21.200 | Ones | 0.00000 | 0.020000 | 21.20000 |
| 42P1515M | 29 Dec 2011 | 4 | 10.000 | 11.100 | Ones | 0.00000 | 0.020000 | 11.10000 |

[illegible]

| | 132129 | 95 | 2230 | 422 | 172 | 4080 |
|--------|--------|------|------|-----|------|------|
| 132130 | 95 | 2230 | 422 | 172 | 4080 | 1713 |
| 138361 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138362 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138363 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138364 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138365 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138366 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138367 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138368 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138369 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138370 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138371 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138372 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138373 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138374 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138375 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138376 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138377 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138378 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138379 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138380 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138381 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138382 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138383 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138384 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138385 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138386 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138387 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138388 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138389 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138390 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138391 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138392 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138393 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138394 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138395 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138396 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138397 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138398 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138399 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138400 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138401 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138402 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138403 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138404 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138405 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138406 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138407 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138408 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138409 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138410 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138411 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138412 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138413 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138414 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138415 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138416 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138417 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138418 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138419 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2172 |
| 138420 | 630 | 0890 | 180 | 80 | 312 | 2 |

[illegible]

Hot Blitz

Diskusi Subsidi BBM



Ketua Umum Angkatan Muda Pemersatu Rakyat (Ampera) Anwar Efa Doroek (kiri) bersama Anggota Prodem Bob Randilawa berbicara dalam diskusi yang bertajuk 'Menggagas Subsidi BBM yang Berkualitas' di Jakarta, kemarin. Diskusi yang digelar oleh Forum Lintas Masyarakat Jakarta Utara (Limatara) ini mengaitkan rakyat untuk bersikap kritis mengawasi kebijakan pemerintah terkait subsidi BBM.

Corporate Action

Garuda Ngebet Jadi Maskapai Bintang Lima

GARUDA Indonesia menargetkan di 2015 meraih maskapai bintang lima. Caranya, meningkatkan pelayanan untuk konsumen. Peningkatan pelayanan itu antara lain, mendirikan kantor penjualan tiket di tempat-tempat strategis, membuka rute-rute baru dan layanan lainnya.

"Tahun 2010 kita sudah menyangkal predikat maskapai bintang empat. Tahun ini kita berharap bisa menyangkal predikat maskapai bintang lima," kata Direktur Niaga Garuda Indonesia M Arif Wibowo, kemarin.

Menurut Arif, Garuda terus meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan pola pengembangan pelayanan agar konsumen lebih nyaman menggunakan transportasi tersebut.

Selain membuka rute penerbangan di Provinsi Gorontalo, Garuda berencana membuka beberapa rute domestik lainnya yang sampai saat ini masih dalam kajian.

"Kantor penjualan juga akan dibuka di beberapa kota termasuk di Kota Cilegon, tapi ini masih dalam kajian," ujarnya.

Arif menjelaskan, saat ini

Garuda sudah memiliki 12 kantor penjualan di 11 wilayah Jabodetabek. Pada Maret 2012 direncanakan akan membuka kantor pelayanan terpadu atau Garuda Center di Senayan, Jakarta.

Garuda Indonesia pada akhir 2009 berhasil meningkatkan peringkat layanan dari maskapai bintang tiga menjadi maskapai bintang empat. Ini sesuai hasil audit yang dilaksanakan Skytrax sejak Oktober 2009 pada beberapa rute penerbangan Garuda seperti Singapura, Melbourne, Beijing, Bali, Jakarta, Perth, Sydney, Hong Kong dan Seoul.

Skytrax merupakan lembaga swasta pemeringkat maskapai penerbangan dunia yang berkedudukan di London, Inggris yang berdiri sejak 1989.

Saat ini Sky Trax merupakan satu-satunya lembaga pemeringkat internasional yang menjadi acuan seluruh maskapai penerbangan internasional. ■ DIT

Merpati Pedes Raih Laba Operasional Rp 40 Miliar

PT Merpati Nusantara Airlines optimis dapat memenuhi target laba operasional Rp 40 miliar tahun ini. Itu meningkat dibanding laba operasional 2010 sebesar Rp 243 juta.

"Target laba operasi 2011 dapat dipenuhi dengan catatan sunting modal dari pemerintah Rp 600 miliar dapat direalisasikan tahun ini," kata Direktur Utama Merpati Sardjono Jhony Titjroksomo di Kantor Kementerian BUMN, kemarin.

Saat ini Merpati sedang mengajukan penawaran saham (PMN) sebesar Rp 600 miliar dalam rangka revitalisasi dan restrukturisasi usaha perusahaan.

Sebelumnya, pada 2009 perusahaan mendapat suntikan dana sekitar Rp 300 miliar. Jhony mengatakan, usulan penambahan modal tersebut tertuang dalam Penyusunan *Business Plan* Merpati 2011-2015, yang saat ini masih dibahas bersama Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang bertindak sebagai perusahaan penasihat perusahaan Merpati.

"Pembelian sedang berlangsung, tinggal menunggu keputusan pemerintah. Kami berharap dana yang kami butuhkan dapat teralisasi secepatnya," ucap Jhony.

Menurutnya, dana restrukturisasi Rp 600 miliar tersebut sebagian besar akan dipergunakan untuk melakukan revitalisasi mesin-mesin pesawat termasuk pengadaan pesawat baru.

Saat ini jumlah pesawat jet Merpati jenis Boeing 737 sebanyak 10 pesawat, dan 14 pesawat jenis biplan-biplan. "Tahun ini kami akan menambah pesawat jet 13 unit jenis Boeing 737-300, Boeing



Sardjono Jhony Titjroksomo

737-400, dan Boeing 737-500," jelas Jhony.

Selain itu, dana restrukturisasi juga akan digunakan untuk revitalisasi beberapa mesin pesawat Merpati yang saat ini mengalami kerusakan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan fasilitas di bandara.

Dengan penambahan armada tersebut diharapkan terjadi peningkatan tingkat isian penumpang hingga 80 persen dari sebelumnya sekitar 76 persen.

Menurut catatan, tingkat isian penumpang Merpati pada 2010 mencapai 12.000 kursi per hari. Itu meningkat dari sekitar 6.000 kursi per hari pada 2009.

Jhony mengatakan, kelanjutan restrukturisasi dan revitalisasi usaha Merpati sangat tergantung pada realisasi PMN yang pengajuanannya didasarkan pada empat poin yaitu, dilakukan secara transparan, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Pengelolaan Merpati dilakukan transparan dengan melibatkan semua unsur sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang lebih maksimal. ■ CR-2

Harga Minyak Dunia Masih Tinggi Dan SPBU Belum Siap

DPR Ngotot Pembatasan BBM Subsidi Dibatalin Saja

Pemerintah menunda rencana pembatasan BBM bersubsidi April depan. Namun, DPR meminta rencana itu dibatalkan.

PADA wakil rakyat berlatas, harga minyak dunia masih tinggi dan stasiun bahan bakar umum (SPBU) Jabodetabek belum semuanya siap. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi dilakukan dengan asumsi komisi dan melalui suatu kajian yang dilakukan oleh akademisi.

Selain itu, pemerintah juga melakukan kajian terhadap perkembangan minyak saat ini dan dampak inflasinya. "Tergantung kesiapan Jabodetabek dan sebagainya, tapi ada baiknya kita tunda itu (pembatasan BBM)," ujar Hatta di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, Ketua Umum PAN ini tidak mau pemerintah

dibilang tidak tegas karena baltanya kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi.

"Kita harus realistis. Bukan kita tidak tegas atau menclai-mencie, tapi kita harus cari solusi untuk rakyat. Kita harus sesuaikan itu," jelasnya.

Sebab itu, menurut Hatta, bisa jadi pembatasan premium yang rencananya mulai dilakukan di Jabodetabek 1 April 2011 akan mundur akibat situasi perekonomian yang belum kondusif.

Menurut Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menambahkan, pembatasan BBM bersubsidi akan didiskusikan Menteri ESDM, Pertamina dan Komisi VII DPR untuk melihat kelayakan program tersebut.

"Hasil kajian dan kelayakan belum diujikan prima, jadi mau tidak mau ditunda," ujar Agus menanggapi penundaan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi itu di DPR, kemarin.

Padahal, kata Agus, Kementerian Keuangan sudah menjalankan adanya pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi pada tahun ini.

Meski begitu, Agus menyatakan, program pembatasan BBM bersubsidi sudah mesti diujikan, jangan sampai melebihi angka 38 juta kiloliter.

"Nah, kalau sampai terjadi pelepasan ini, saya rasa program selanjutnya tetap ada pembatasan, tapi menunggu konsepnya lebih matang. Mungkin ke depan, tidak hanya se-Jabodetabek saja tapi se-Jawa," terang Agus.

Namun, menurut Agus, jika rencana pembatasan BBM bersubsidi dibatalkan, dampaknya akan membuat tekanan dan tambahan anggaran Rp 3-6 triliun.

Pasalnya, saat ini pemerintah terpaksakan harga minyak 80 dolar AS per barel.

Meski begitu, pihaknya belum ada rencana merevisi anggaran.

Kementerian itu akan terus menapadi harga minyak dunia, apalagi kondisi Timur Tengah masih agak rawan.

Selain itu, pemerintah juga memperkirakan *living* minyak. Sebab, dalam perkembangan asumsi yang selama ini disepakati sebesar 970 ribu barel tidak akan tercapai.

Ditanya dari mana anggaran untuk menutupi subsidi Rp 3-6 triliun, Agus mengaku akan ada asumsi lain, misalnya kurs rupiah yang baik dan pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Agus mengatakan, yang terpenting pembatasan BBM nanti harus efektif. Karena itu, pihaknya akan koordinasi dengan Kementerian ESDM.

Batalan Saja

Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi mengatakan, sebaiknya pemerintah menbatalkan pembatasan BBM jika tidak siap melaksanakan ke-

bijakan itu.

"Kalau belum siap jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan akan menimbulkan masalah baru," pintanya.

Apalagi, kata dia, perkembangan harga minyak dunia terus naik karena terjadi gelombang di Timur Tengah. Namun, dia menolak jika pemerintah menaikkan harga premium. Sebab, dampaknya lebih besar dari pembatasan BBM bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Gandindo berharap pemerintah mengambil kebijakan cermat. Kebijakan menunda pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi karena harga minyak memang sedang tinggi.

"Sedanya ini akan berdampak pada kenaikan pertamax dan menimbulkan inflasi. Tentu saja akan berpengaruh kalau kebijakan pembatasan BBM dilakukan," lukasnya. ■ DIT



PIDATO: Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion di Jakarta, kemarin. Diskusi yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mengambil tema "akselerasi pembangunan perekonomian nasional"

Butuh Dana Rp 1.923 Triliun Untuk Bangun Infrastruktur

PEREMINTAH butuh dana Rp 1.923 triliun untuk membangun infrastruktur di Indonesia hingga 2014.

Jika ini terpenuhi, sangat mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh 8 persen.

"Kita harus melakukan suatu terobosan kalau ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen, bahkan 8 persen di 2014. Perkiraan kasarnya, kita butuh Rp 1.923 triliun dalam waktu lima tahun ke depan," ujar Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah-Swasta Badan Pencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bastary Pandji Indra di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dari dana Rp 1.923 triliun itu, pemerintah hanya mampu memenuhi sepertiganya saja atau Rp 600 triliun.

Pemerintah ingin BUMN tidak hanya jadi kontraktornya, tapi juga investor, ujarnya.

Pemerintah, kata dia, saat ini sedang gencar mengundang investor dalam bentuk *public-private partnership* (P3), menu apa yang

telah dilakukan Malaysia, Filipina dan Korea Selatan.

Sebab itu, masalah infrastruktur memang yang paling sering dikeluhkan oleh pengusaha dan investor di Indonesia. Infrastruktur yang lemah menghambat upaya ekonomi semakin tinggi.

Banyak proyek infrastruktur yang saat ini sedang ditawarkan pemerintah ke swasta dengan skema P3. Ternyata, banyak investor asing yang tertarik dengan pola kerja sama ini.

"Saya hampir setiap hari kedatangan tamu dari luar negeri, untuk mencari informasi soal kerja sama P3 yang diselenggarakan dan peluang-peluangnya. Kita akui kemampuan investasi perusahaan dalam negeri masih cukup terbatas," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu mengatakan, salah satu permasalahan utama dalam meningkatkan daya saing adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur.

"Infrastruktur menjadi salah satu pekerjaan rumah da-

lam mendorong daya saing," ujar Mari.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendorong pelaku usaha meningkatkan daya saing dengan produk luar.

Mari mengatakan, perlu ada pemetaan wilayah dengan melihat potensi daerah sebelum membangun infrastruktur agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing.

Selain infrastruktur, kenaikan harga bahan baku, penyalidupan, persaingan dengan produk impor, dan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang andal juga menjadi faktor lemahnya daya saing produk dalam negeri. ■ CR-2

Siap Revisi PMK No.133

Menteri Agus Dijinakkan Komisi XI DPR

MENTERI Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo akhirnya menyerah oleh tekanan DPR terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 133 Tahun 2010 tentang kewenangan Komisi Pengawas Perajakan (KPP).

Bekas Dirut Bank Mandiri itu akhirnya berhasil "dijinakkan" Komisi XI DPR dan mau merevisi kewenangan KPP tersebut sesuai dengan usulan DPR.

Untuk diketahui, Komisi XI DPR meminta Kementerian Keuangan (Kemkeu) melakukan revisi terhadap kewenangan KPP yang dinilai terlalu luas dan bertentangan dengan undang-undang (UU).

Pasalnya, selain mengawasi pajak, komisi tersebut juga mengawasi bea cukai.

Menurut Agus, tugas KPP melakukan fungsinya sudah sebagaimana tertulis, yakni memberikan rekomendasi kepada Menkeu dan kelompoknya termasuk pajak dan bea cukai.

Tapi, soal rekomendasi Komisi XI tentang kedudukan PMK 133, kami menangkap aspiasi sidang ini. Kami menawarkan merevisi PMK 133 itu," ujar Agus saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, kemarin.

Menurutnya, revisi tersebut mempertimbangkan besarnya tanggapan di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai terkait masalah perpajakan.

Sebab itu, pihaknya akan melakukan revisi dengan menambahkan pasal yang menyatakan bahwa KPP akan fokus pada masalah pajak saja hingga akhir 2011.

Bentuk revisi akan kami lakukan dan diskusikan dengan DPR. Jadi tujuan tetap bisa kita jalankan," jelas Agus.

Anggota Komisi XI DPR Edison Batebuan menyatakan, revisi yang seharusnya dilakukan tidak hanya PMK 133, melainkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

jakan (KUP). Hal itu dilakukan supaya tidak mengganggu perdagangan lagi terkait masalah perpajakan.

"Kita harus mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang KUP. Kita tidak ingin hanya merevisi PMK yang nantinya akan terus mengundang perdebatan, tapi fokus ke pendekatan hukum yang lebih kuat," kata Edison.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Laurens Bahang Dama menyambut baik langkah Menkeu dalam menyelesaikan masalah KPP. Menurutnya, PMK tidak boleh bertentangan dengan UU KUP.

Revisi tersebut mempertimbangkan besarnya tanggapan di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai terkait masalah perpajakan.

Dalam rapat dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, Menkeu sempat menolak. Menurutnya, anggota dewan tidak seharusnya memaksa PMK No. 133 Tahun 2010 dicabut.

"Jangan kemudian karena emosi lalu aturan ini harus dicabut. Kalau begitu kondisi, saya katakan saya tidak setuju," terang Agus ketika itu.

Menurut Agus, dewan tidak perlu memberi instruksi kepada dewan, apakah akan memberhentikan KPP atau memberhentikan Dirjen Bea Cukai Thomas Sugjaya. "Kalau saya hubungan dengan kualitas. Itu akan terus dijadi dan saya yakin anggota DPR juga demikian," lukasnya. ■ DIT

BP Migas Akui Produksi Minyaknya Menurun

PRODUKSI minyak yang dikelola Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) saat ini mengalami penurunan. Namun, menurutnya produksi minyak tergolong kinerja gas.

Secara keseluruhan, produksi minyak dan gas bumi per 22 Januari 2011 mencapai 2,45 juta barel ekuivalen minyak per hari. Angka ini melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,364 juta barel per hari.

"Rata-rata produksi gas mencapai 8.662 juta kaki kubik per hari, sementara produksi minyak 905 ribu barel per hari. Jadi, turunnya produksi minyak tergolong kinerja gas," kata Kepala

Dinas Humas dan Hubungan Kemitraan BP Migas Elan Biantoro kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Elan mengaku, produksi minyak mengalami banyak kendala. Sejak tahun 2009, produksi minyak mengalami penurunan karena keterbatasan proyek.

"Potensi kehilangan produksi minyak mencapai 37,85 ribu barel per hari," ujarnya.

Kehilangan produksi, menurut Elan, karena faktor alam, misalnya hujan, petir, gelombang tinggi, dan banjir menjadi penyumbang terbesar dengan potensi kehilangan produksi lebih

Rata-rata produksi gas mencapai 8.662 juta kaki kubik per hari, sementara produksi minyak 905 ribu barel per hari. Jadi, turunnya produksi minyak tergolong kinerja gas.

dari 10 ribu barel per hari. Belum lagi kerusakan fasilitas produksi yang menyebabkan berhentinya operasi dengan potensi kehilangan produksi lebih dari 8.000 barel per hari.

Ada juga beberapa hambatan lain yang tidak terduga sebagai kehilangan produksi yaitu berkontribusi terhadap pencapaian produksi. Misalnya, lumpur tumpah lahan yang berdampak pada pengunduran jadwal pembaruan sumur-pengembangan. Ini terjadi pada beberapa kontraktor seperti Chevron, Pacific Indonesia, Petrochina, dan Pertamina EP, dan JOB Taisman Jambh Merang.

Elan mencontohkan Chevron, persoalan itu tidak dapat dilaksanakan pembaruan 50 sumur-pengembangan di Lapangan Minas, Riau karena penyesuaian lokasi.

"Kami terus melakukan monitoring ketat agar tidak terjadi di lapangan. Kami juga meminta kontraktor di lapangan segera diselesaikan," terangnya.

Pengawasan secara intensif, kata Elan, dilakukan kepada lima kontraktor besar yang memproduksi minyak cukup signifikan.

Pada kontraktor tersebut yakni Chevron Pacific Indonesia, Pertamina EP, Total E&E Indonesia, ConocoPhillips, dan Kodeco Energy. Masing-masing kontraktor memproduksi minyak 10-15 ribu barel per hari.

Sebab itu, saat ini BP Migas dan kontraktor kontrak kerja sama berupaya meminimalisir gangguan produksi dan masalah non teknis yang terjadi di lapangan. "Kami optimis hasil produksi dan pertumbuhannya akan terus meningkat. Kita juga akan terus meningkatkan produksi," pungkasnya. ■ DIT



Ruben Wuarbanaran

Jelang Turkmenistan Vs Indonesia

Duet Kandidat Naturalisasi Gabung Timnas

DUA kandidat pemain naturalisasi, Ruben Wuarbanaran dan Diego Michiels telah bergabung dengan para pemain Timnas Pra Olimpiade untuk mengikuti latihan di Senayan Jakarta, kemarin.

Yongky Ariswibowo dan kawan-kawan bertolak dari Palembang pukul 11.00 WIB. Meski baru tiba di Ibukota, pelatih Alfred Riedl tetap menggelar latihan bagi para pemainnya tersebut. Latihan di gelar sejak pukul 17.00 WIB. Sebanyak 23 pemain terlihat ikut ambil bagian dalam latihan sore ini.

Ruben sebelumnya telah berada di Jakarta sejak pekan lalu. Tapi pemain asal Belanda itu belum bisa ikut latihan bersama karena masih berurusan dengan cedera otot paha.

Kemarin dia sudah terlihat

ikut berlatih bersama dengan pemain Timnas U-23 lainnya. Hanya saja dia masih menjalani latihan ringan bersama dua pemain lainnya, Besma Tinas Bonay dan Dendi Santoso mereka menjalani latihan ringan.

Selain Ruben, Diego Michiels juga terlihat di lapangan PSSI Senayan Jakarta. Pemain Go Ahead Eagles Deventer itu ikut berlatih bersama kelompok Ruben dan Johan Yoga. Keduanya juga hanya menjalani latihan ringan tanpa jogging mengelilingi lapangan. Sedangkan pemain lainnya menjalani game di bawah pengawasan asisten pelatih Wolfgang Pikel. Asisten Widodo C Putra mengatakan semua pemain sudah melupakan kekalahan sebelumnya. "Mulai hari ini mereka sudah harus berlatih lagi," ujarnya. ■ WUR



CRISTIANO RONALDO

Pengen Mandi Di Cibeles

CRISTIANO Ronaldo mengaku ingin melepas mandi bersama rekan-rekannya di Real Madrid di air mancur Cibeles akhir musim nanti. Ronaldo iri karena sejak kehadirannya di musim 2009 silam ia tak sekalipun merasakan pesta di air mancur bersama rekan-rekan barunya itu. Hal itu terjadi karena sejak kedatangannya, *Los Blancos* belum lagi mampu meneguhkan gelar di kompetisi apapun. Sedangkan ritual perayaan di tempat liburan yang terletak di dalam Plaza de Cibeles itu diakhiskan setelah Madrid meraih gelar.

Rasa penasaran itulah yang



kini terus mengganggu hari-hari pemain berbulu CR 7 itu. Untuk itu, Ronaldo berencana membawa Madrid meraih gelar juara, terutama trofi La Liga. ■ ULU



LIGA CHAMPIONS:

16 Besar Leg 1:
Inter Milan vs Bayern Munich 0-1
Marseille vs Manchester U. 0-0

LIGA EUROPA:

16 Besar Leg 2:
FC Porto vs Sevilla 0-1

LIGA PREMIER:

Arsenal vs Stoke City 1-0

Klasemen Sementara Lima Besar:

| No. Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
|----------------------|----|----|---|---|----|-------|
| 1. Manchester United | 26 | 18 | 9 | 1 | 57 | 57 |
| 2. Arsenal | 27 | 17 | 5 | 5 | 57 | 57 |
| 3. Manchester City | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 24 |
| 4. Tottenham Hotspur | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 31 |
| 5. Chelsea | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 22 |

SERIE A:

Bologna vs AS Roma 0-1

Klasemen Sementara Lima Besar:

| No. Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
|-------------|----|----|---|---|----|-------|
| 1. AC Milan | 25 | 16 | 7 | 3 | 46 | 20 |
| 2. Napoli | 26 | 16 | 4 | 6 | 41 | 22 |
| 3. Inter | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 | 29 |
| 4. Lazio | 26 | 14 | 6 | 6 | 33 | 22 |
| 5. Udinese | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 30 |

Kuasa Hukum George Cari Berkas Baru

KOMISI Banding Komite Pemilihan PSSI masih terus mempelajari dan membahas memori banding yang diajukan empat bakal calon Exco yang sama-sama terjerat pada tahapan verifikasi Komite Pemilihan Pengesahan Calon Exco PSSI 2011-2015 itu.

"Kami masih belum bisa memastikan kapan (tugas) ini bisa diselesaikan," ungkap Alfred Simanjuntak, anggota Komisi Banding Komite Pemilihan, kemarin.

Empat calon Exco PSSI 2011-2015 yang tak lolos dari proses verifikasi dan mengajukan banding adalah Arifin Panigoro, George Toisutta, Sihar Situmorang dan Tuty Dau. Arifin Panigoro untuk pengajuan calon ketua umum dan wakil ketua umum. George Toisutta untuk posisi wakil ketua umum, sementara Sihar Situmorang dan Tuty Dau untuk posisi anggota Exco.

Tenggat waktu untuk Komisi Banding semula disebutkan tiga hari, terhitung sejak Rabu (23/2). Namun, Komisi Banding yang diketuai pakar komunikasi publik Tjipta Lesmana dengan wakil ketua Prof Gayus Lumbun ini diperkakan membunuh waktu lebih lama lagi, karena hingga kemarin tim kuasa hukum George masih berusaha menambalkan

berkas-berkas baru.

Sementara itu, Deputi Sekjen PSSI, Hamka B Kadi ketika ditanya soal statuta PSSI mengatakan bahwa statuta PSSI yang disahkan pada 20 April tahun lalu memang sudah ditafikasi di Kongres Luar Biasa yang dihadiri Director Legal dan Pengembangan Asosiasi FIFA, Thierry Regennas.

"Dalam penyusunan Statuta PSSI itu sejak awal kami terus berkorespondensi dengan FIFA," ujar Hamka.

FIFA dan IOC Setuju Sikap Menpora yang terus mempersoalkan Statuta PSSI sangat disayangkan, khususnya

menyangkut ketidakpuasnya atas isi Pasal 35 ayat 4 yang antara lain mengatur keharusan anggota Komite Eksekutif PSSI tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal pada saat Kongres berlangsung.

FIFA, bahkan juga Komite Olimpiade Internasional (IOC) sepenuhnya telah sama-sama menyetujui redaksional dan substansi isi dari pasal 35 ayat 4 Statuta PSSI tersebut.

Pesetujuan FIFA itu tertuang dalam surat Director of Legal Affairs FIFA, Marc Villeret, dan Head of Corporate Legal FIFA, Fabienne Moser-Frei bertanggal 11 Oktober 2010, dan dikirimkan

kepada Sekjen PSSI Nugraha Besos.

Permasalahan ini muncul setelah PSSI dalam statutanya membuat aturan sendiri yang berbeda dengan FIFA. Statuta PSSI menyebutkan, syarat komite eksekutif (antara lain Ketua Umum) harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal.

Sementara FIFA, dalam statutanya menegaskan bahwa statutanya tidak pernah dinyatakan bersalah dalam tindakan kriminal. Kalau PSSI mengadopsi FIFA, maka Nurdin tidak akan lolos karena dia pernah dipenjara karena kasus korupsi. ■ WUR

LIGA CHAMPIONS

JUARA BERTAHAN DI BIBIR JURANG

Inter Milan terancam gagal mempertahankan gelar Liga Champions. Tampil di kandang sendiri Giuseppe Meazza, Inter Milan menelan kekalahan atas Bayern Muenchen 0-1 (0-0).

GOL tunggal tim tamu pada laga perdanal final leg 1 itu dihasilkan Mario Gomez di injury time. Hasil buruk tersebut sangat membekatkan langkah J Nerazzurri selanjutnya. Mereka harus menang dengan skor minimal 2-0 untuk lolos ke perempat final Liga Champions 16 Maret mendatang di Allianz Arena markas Die Roten.

Die Bayern langsung tampil ofensif di babak pertama. Mereka berusaha memasukkan gol sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan gol away.

Pertandingan yang berlangsung Kamis dini hari WIB juga merupakan misi balas dendam klub yang pernah di-bela legenda sepak bola Jerman Franz Beckenbauer. Klub asal kota Munich tersebut, dikalahkan Si Biru Ulatin Musim lalu.

Sayang belum tercapai satu gol pun di babak pertama. Beruntung van Gaal memiliki striker Gomez.



Bayern Muenchen selangkah lagi kedaplan besar.

Persiapan Cuma Dua Hari

Debut Manis Si Kapal Terbang

VINCENZO Montella sebagai pelatih anyar AS Roma sukses meraih kemenangan perdana di debutnya kala menaklukkan Bologna 1-0, kemarin malam. Debut yang terbilang impresif mengingat Montella yang minim pengalaman melatih hanya punya waktu dua hari untuk mempersiapkan skuadnya.

Montella yang setelah pensiun menjadi pelatih junior Roma ditunjuk sebagai pengganti Claudio Ranieri yang mundur setelah gagal memperbaiki performa Srigala Ibukota. Penunjukkan Montella sedikit meragukan karena tak punya pengalaman melatih di tim senior. Namun pelatih yang semasa jadi pemain terkenal dengan selebrasi gol ala kapal terbang (*L'Aeroplanno*) ini mampu menjawab keraguan tersebut.

Pria berusia 36 tahun tersebut meraih kemenangan di laga perdananya sekaligus mengakhiri hasil buruk Roma lewat gol semata wayang Daniele De Rossi (45') di kandang Bologna, padahal Montella hanya punya waktu dua hari untuk mempersiapkan timnya. Tak heran, sesuai pertandingan Montella memang sangat emosional ketika mengakhiri kemenangan perdananya itu.

"Saya merasakan emosi yang kuat, tetapi hanya saat pertandingan berakhir. Sebelum itu, saya bersikap tenang. Sangat



Daniele De Rossi

sulit dalam mempersiapkan semuanya hanya dalam dua hari," ujar Montella.

Dalam laga tersebut, Montella membuat keputusan kontroversial dengan mencadangkan ikon Roma Francesco Totti sebagai starter. Tak hanya itu, Montella juga memarkir starter lainnya seperti Jeremy Menez, Julio Segura, dan Juan.

Mengenai keputusannya itu, Montella punya alasan sendiri. Menurutnya, posisi sang kapten sebagai striker tidak sesuai

dengan strategi Montella yang lebih memaksimalkan sektor sayap untuk merendat strategi Bologna.

"Untuk pertandingan ini, tim tidak bisa bermain dalam konsep *tridente* meski Totti sedang tampil bagus," ujar Montella dikutip dari Football-Italia. "Mencadangkan Totti merupakan keputusan yang berdasarkan alasan teknis dan Totti baik-baik saja. Saya yakin dia akan segera menjadi *starter* di formasi saya," pungkasnya. ■ ULU

nyala gol pada menit 90. Keadaan selalu sulit di Munich. Anggap saja mereka memiliki ball possession yang bagus, kami memiliki kesempatan untuk mencetak skor. Bagi saya, segala sesuatu

masih terbuka," katanya seperti dilansir *sky sports*.

Di pertandingan lain, Manchester United bermain seri tanpa gol dengan tuan rumah Olimpique Marseilles. ■ CR-8

nyala gol pada menit 90. Keadaan selalu sulit di Munich. Anggap saja mereka memiliki ball possession yang bagus, kami memiliki kesempatan untuk mencetak skor. Bagi saya, segala sesuatu

masih terbuka," katanya seperti dilansir *sky sports*.

Di pertandingan lain, Manchester United bermain seri tanpa gol dengan tuan rumah Olimpique Marseilles. ■ CR-8

Nyonya Tua Uber Bomber Brondong

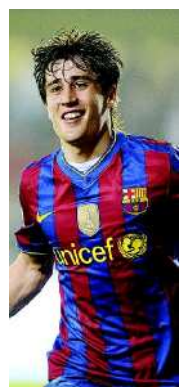
JUVENTUS tak henti-hentinya menambah daya gedor lini depan. Setelah sukses mengagkat bomber Caghiari, Alessandro Matti, pada bursa transfer Januari lalu, si Nyonya Tua dikabarkan mengincar striker muda Barcelona Bojan Krkic.

Penyerang 20 tahun itu saat ini sedang frustrasi karena pelatih Pep Guardiola belum juga memasukkan dia ke tim inti. Bojan kesulitan bersaing dengan Pedro Rodriguez, David Villa, dan Lionel Messi yang lebih sering diturunkan Guardiola sebagai starter.

Bojan memang sudah memperpanjang kontrak, yang membuatnya bisa bertahan hingga 2015 di Camp Nou. Namun, bukan tidak mungkin, pemain internasional Spanyol memilih untuk hanggang dari Blaugrana.

Kesempatan itulah yang digunakan Juve untuk mengagkatnya. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, El Bianconeri sudah mengirim seorang pemadam bakat untuk terus memantau perkembangan Bojan.

Menurut harian olahraga Italia itu lagi, Juve dikabarkan bersedia menaruh Vincenzo Iaquinta dan Jorge Martinez dengan pemain yang di Barca berkesempatan semblilan itu. Kesempatan mendapatkan Bojan semakin terbuka mengingat Iaquinta dan Martinez memang sudah menyatakan



Bojan Krkic

diri ingin hanggang dari Olimpico Turin akhir musim nanti.

Kendati demikian, bakal tidak mudah bagi Juve mendapatkan servis Bojan ke Anfield dengan harga 20 juta euro (Rp 243 miliar). ■ ULU



Gossip Of The Day



COLEEN ROONEY

Lega, Pencuri Kamera Tertangkap

ISTRI bintang Manchester United Wayne Rooney, Coleen Rooney akhirnya bisa bernapas lega. Pihak kepolisian berhasil menangkap pencuri foto-foto pribadinya. Koleen Rooney yang berusia 15 bulan. Sebelumnya, Coleen sempat panik karena sebelumnya ada seseorang yang memeras dengan memintakan tebusan sebesar 30 ribu pounds (Rp 450 juta). Mendapat ancaman pemerasan, Coleen langsung melaporkan kepada pihak kepolisian.

Kemudian, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tiga pelaku yang diduga telah melakukan pemerasan pada pembawa acara *Real Women* itu.

"Kami tengah menyelidiki tuduhan pemerasan pada September lalu. Pelakunya dua pria dan satu wanita, kini mereka berada dalam tahanan Polisi," demikian pernyataan resmi British Transport Police dilansir *The Sun*.

Pemerasan ini bermula saat Wayne dan Coleen kehilangan kamera pribadi yang berisi foto-foto Koleen Rooney menghadapi konser musik pada bulan Mei 2010 silam. Kamera itu rupanya ditemukan para pelaku yang mengancam akan menjual foto Koleen ke media massa jika tidak mendapat uang tebusan.

Seperti diketahui, foto-foto pasangan selebritis dan keluarganya menjadi komoditas tinggi di media Inggris. Terutama media-media gosip yang bersedia membayar mahal foto jipretan para seleb.

"Orang biasanya mau tahu mereka sesuatu, melakukan apa, bagaimana rupa mereka (di luar lapangan)," kata Simon Samuels sebagai petinggi *Big Pictures*, salah satu perusahaan penyedia foto untuk majalah gosip. ■ NOV

menang atas Felleciano Lopez dari Spanyol dengan skor 6-3, 2-6, 6-4.

"Ini menjadi pertandingan yang menarik, jujur, meskipun aku harus berjuang keras untuk bisa menang. Dia mampu mengembalikan banyak bola yang membuat saya kualahan dan akhirnya membuat saya harus memainkan partai tambahan," ujar Djokovic yang akan menghadapi petenis Jerman Florian Mayer di babak selanjutnya.

Di tempat terpisah, petenis nomor satu dunia, Caroline Wozniacki maju ke perebutan final turnamen tenis Qatar Terbuka dengan kemenangan 6-3, 6-2 atas petenis Rusia, Nadia Petrova.

"Banyak pemain bagus, jadi rasanya tidak mudah untuk tampil sebagai pemenang," kata pemain Denmark, Wozniacki usai pertandingan.

Selanjutnya, Wozniacki sudah diunggulkan petenis Italia, Flavia Pennetta di babak delapan besar. "Rasanya tidak mudah melewati permainan bosok, tetapi saya tetap harus menang karena saya harus melakukannya," katanya.

Unggulan kedua Vera Zvonareva juga sudah maju ke putaran delapan besar setelah mengalahkan petenis dari Slovakia, Dominika Cibulkova 6-1, 6-2. ■ NOV

JELANG CHRIS JOHN VS DAUD JORDAN

THE DRAGON DIJAJAL 2 PETINJU KANGURU

Persiapan juara dunia kelas kelas bulu WBA Chris John untuk mempertahankan gelarinya semakin matang. Dua petinju Australia akan menjadi mitra latihan-tanding The Dragon, julukan Chris John.

KEDUA petinju asal "Negeri Kanguru" tersebut adalah Willem Kickert dan Ben Rahab. Kedua petinju bernaung di sesama yang sama dengan Chris John, yaitu Henry's Gym di Perth, Australia, di bawah asuhan pelatih Craig Christian yang juga manajer Chris John.

"Kita berbagi sama-sama mau bertanding sehingga persiapannya bisa bersama-sama," kata Chris John saat dihubungi wartawan, kemarin.

Berlatih dengan dua mitra tanding tersebut sebagai persiapan Chris John menghadapi penantang petinju asal Kalimantan Barat, Daud "Chino" Jordan. Pertarungan tersebut akan digelar di Hall D Kemayoran, Jakarta, 17 April mendatang.

Kebetulan, kata petinju asal Kabupaten Banjarnegara, Jateng, tersebut, kedua petinju itu (Ben Rahab dan Willem Kickert) memiliki gaya bertarung yang sama Daud Jordan yaitu "counter fighter".

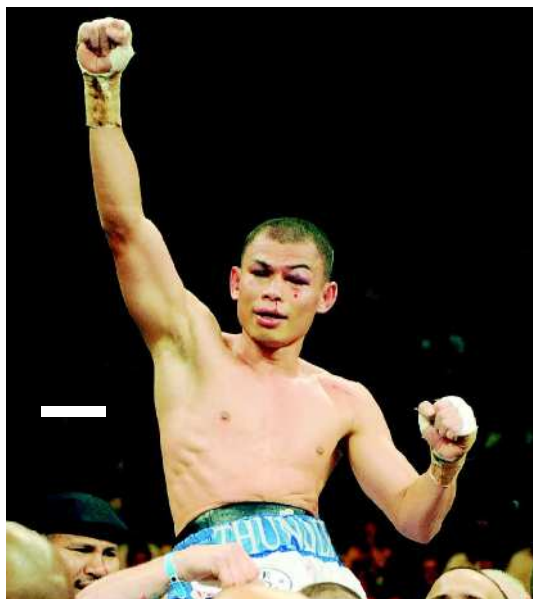
"Dalam latihan dengan kedua petinju itu, seolah-olah saya bertarung melawan dia (Daud Jordan)," kata petinju yang memiliki rekor bertarung 44 kali menang (22 di antaranya dengan KO) dan dua kali seri tersebut.

Chris John mengaku, Daud Jordan memiliki gaya bertarung "counter fighter" sehingga mitra latihan tandingnya harus memiliki gaya bertarung yang hampir sama dengan lawan yang sebenarnya.

Latihan dengan mitra latihan tanding tersebut, kata Chris John, kemungkinan baru dilaksanakan pekan depan karena sekarang dirinya masih konsentrasi latihan untuk peningkatan fisik.

"Pekan depan latihan teknik dengan dua mitra tanding tersebut," katanya menegaskan.

Selanjutnya, Ben Rahab dan Willem Kickert sering menjadi mitra latihan tanding Chris John dalam persiapan untuk pertarungan perebutan gelar, seperti saat melawan Fernando Saucedo (Argentina), Rocky Juarez (Amerika Serikat), Hiroyuki Enoki (Jepang), Roinet Cahallero (Panama), serta Osamu Sato dan Zaiki Takemoto (Jepang). ■ NET/NOV



Gara-gara Skandal 'Kongkalingkong' Massa Bertekad Hapus Dosa

REPUTASI pebalap Ferrari, Felipe Massa di musim lalu sempat teroreng gara-gara skandal *team order* atau kongkalingkong. Kini, pebalap asal Brazil itu bertekad menghapus dosa tersebut dengan meraih kesuksesan di musim depan.

Seperti diketahui, pada musim lalu di GP Jerman, tim *Kuda Jangkrik*, julukan Ferrari, melakukan praktik kontrol prestasi memperlakukan Massa yang saat itu berada di depan untuk mengalah dan memberikan jalan pada rekannya Fernando Alonso. Padahal, Massa berpeluang naik podium pertama, tapi harus merebutkan pada Alonso atas instruksi Ferrari.

Atas praktik tersebut, Ferrari dan Alonso langsung kebanjiran kritik dan kecaman. Bahkan, Massa juga diancam karena ikut mendukungnya.

Meski musim depan praktik *team order* sudah dilegalkan.



Felipe Massa

Massa mengaku belum bisa melupakan kesalahannya itu dan berniat untuk menghapuskannya. Dia berjanji akan menghapus dosa itu dengan meraih kemenangan sebanyak banyaknya.

"Orang-orang sangat mengingat insiden itu. Memang sebuah kemenangan lebih mudah dilupakan dari pada kejadian malakulmu itu," kata Massa. "Pengalaman itu memang tidak menyenangkan. Tapi itu bukan sesuatu yang terpaksa di pikirkan. Saya akan menghentikannya dengan memenangi setiap balapan," tambahnya.

Selain itu, Massa juga bertekad untuk membuktikan pada timnya bahwa dia bukan pebalap nomor dua. Di mana Ferrari lebih memprioritaskan Alonso dibanding Massa.

"Keputusan Ferrari memilih seorang pembalap dalam kesempatan untuk memperebutkan gelar juara, menjadikan peluang tim sangat tipis," tandasnya.

Dari hasil uji coba pra musim terakhir di Silverstone, Massa menunjukkan kesuksesannya dengan mencatat waktu tercepat. ■ NOV

Debut Melo Antarkan Kemenangan Kincks

KEBERHASILAN New York Knicks mendatangkan Carmelo Anthony dari Denver Nuggets tidak sia-sia. Carmelo menjadi motor penggerak bagi Knicks di laga perdana saat memunculkan Milwaukee Bucks 114-108 di Madison Square Garden, kemarin.

Di laga tersebut, pebasket yang akrab disapa Melo itu langsung disambut meriah oleh ribuan fans Knicks yang memadati stadion. Teriakan fans yang mengumandangkan nama Melo makin membahana saat tim tuan rumah berhasil mengungguli Bucks 33-24 di kuarter pertama.

Bucks sempat memberikan perlawanan di kuarter kedua, melalui duet maut John Salmons dan Andre Bogut. Sayangnya, tim tuan rumah masih terlalu kuat untuk diadapi.

Kuarter terakhir berjalan lebih ketat. Knicks mampu menjaga jarak 88-83 sebelum akhirnya memenangkan pertandingan usai meraih 28 angka tambahan di kuarter pamungkas, sementara tim tamu tidak mampu mendulang banyak poin setelah hanya unggul setengah bola (29).

Di laga ini, Melo menandai *double-double* 27 poin dan 10 rebound untuk Knicks. Sementara status *top performers* jatuh pada Tony Douglas yang melesakkan 23 poin tiga rebound dan tiga assist.

Di kubu Bucks, John Salmons menjadi *top performer* dengan 27 poin empat rebound dan tujuh assist. Sementara Andre Bogut mencatat *double-double* dengan 14 poin 12 rebound.

"Mendapat banyak pujian adalah hal biasa untuk Anthony. Di lapangan dia bermain, pasti akan mampu membuat 27 poin dan 10 rebound," puji pelatih Knicks Mike D'Antoni memuji penampilan perdana Melo bersama klubnya.

Sesuai pertandingan, Melo mengaku senang bisa membela Knicks yang memiliki pendukung fanatik. "Para fans benar-benar luar biasa malam ini. Saya sangat senang di rumah saya dan saya sudah di rumah sekarang," kata Melo.

Di tempat terpisah, LA Lakers meraih kemenangan kedua di paruh musim ini dengan susah payah. Menghadapi Portland Trail Blazers, Lakers yang datang sebagai tim tamu harus *overtime* sebelum menang 106-101.

Di laga ini, Bryant menjadi pengumpul poin terbanyak dengan 37 poin dan sembilan rebound. Sedangkan Paul Gasol sukses mencetak *double-double*, 18 poin dan 14 rebound. ■ NOV

Roger Federer

FedEx Melenggang, Djoker Banta Tulang

PETENIS nomor dua dunia Roger Federer terus berusaha melupakan kegagalannya merebut gelar Grand Slam Australia Terbuka 2011. Kini, petenis asal Swiss itu bertekad meraih gelar Dubai Terbuka yang digelar di Uni Emirat Arab (UEA).

FedEx, julukan Federer, yang menempati urutan pertama melalui mulus ke babak kedua setelah mengalahkan petenis Spanyol, Marcel Granollers 6-3, 6-4.

Di tempat terpisah, petenis nomor satu dunia, Caroline Wozniacki maju ke perebutan final turnamen tenis Qatar Terbuka dengan kemenangan 6-3, 6-2 atas petenis Rusia, Nadia Petrova.

"Banyak pemain bagus, jadi rasanya tidak mudah untuk tampil sebagai pemenang," kata pemain Denmark, Wozniacki usai pertandingan.

Selanjutnya, Wozniacki sudah diunggulkan petenis Italia, Flavia Pennetta di babak delapan besar. "Rasanya tidak mudah melewati permainan bosok, tetapi saya tetap harus menang karena saya harus melakukannya," katanya.

Unggulan kedua Vera Zvonareva juga sudah maju ke putaran delapan besar setelah mengalahkan petenis dari Slovakia, Dominika Cibulkova 6-1, 6-2. ■ NOV

Superliga Bulutangkis 2011

Putri Suryanaga Masih Perawan

TIM putri Jaya Raya Suryanaga Surabaya makin melesit dengan mencatat rekor tak pernah kalah. Tim besutan Wijanarko Adi Mulya itu melaju ke final setelah menumbangkan lawan-lawannya di ajang Superliga Bulutangkis 2011 di Surabaya, kemarin.

Di laga hari ke empat ini, Shinta es berhasil menumbangkan tim putri Jaya Raya Jakarta dengan skor telak 4-1. Kemenangan Jaya Raya Suryanaga ini dimulai dari laga nomor tunggal putri, Bolleatrix Maniputty (Jaya Raya Jakarta) melawan Lindawati.

Pada pertandingan pertama ini, Bella harus kalah dari lawan mainnya dengan skor 15-21 dan 15-21. Kemenangan Lindawati pun berlanjut pada nomor ganda pertama. Pasangan Yati Leidi-Sinta Mollisa berhasil mengalahkan duet Nitya Krishinda-Della Desiastara dengan skor 17-21 dan 15-21.

Teringgal 2-0, rupanya membuat anak-anak Jaya Raya Jakarta bangkit. Hasilnya, di nomor tunggal putri kedua, Rena Suwarno berhasil menang atas Aprilia Yuswandari melalui Rubber set dengan skor 15-21, 23-21 dan 21-13. Rupanya, pada nomor ganda kedua, Jaya Raya Jakarta tidak bisa bertahan dengan permainan terbaik.

Hasilnya pun harus keceolangan setelah pasangan Nadya Melati-Anneke Feiya harus dilibas oleh duet Viciela Aprikasi-Lilya Linanto dengan skor 21-10, 13-21 dan 7-21. Akhirnya, Tika Andri Nungrum melangkapi kemenangan Jaya Suryanaga setelah mengalahkan Riski Amalia dengan skor 12-21 dan 14-21.

Atas kemenangan itu, Tim Putri Jaya Raya Suryanaga makin memantalkan dengan rekor tidak pernah kalah selama 5 kali bertanding. "Kami optimis akan melaju ke Final dengan kondisi seperti ini," kata Wijanarko.

ANTV Siarkan Final

Sementara itu, televisi swasta, ANTV akan menayangkan secara langsung final Superliga Bulutangkis 2011 di Surabaya. Untuk final putri akan berlangsung 25 Februari dan final putra 26 Februari 2011.

"Mudah-mudahan para pemirsa ANTV terhibur dan ikut memberikan semangat untuk pemain bulutangkis Indonesia," kata Presiden Direktur ANTV, Dudi Hendrakusuma pada wartawan di Jakarta, kemarin.

Kejuaraan bulutangkis beregu ini dipastikan akan berlangsung seru. Selain diikuti pemain terbaik Indonesia, juga diikuti pemain nomor satu dunia asal Malaysia, Lee Chong Wei.

Dari tanah air akan menukarkan adalah Taufik Hidayat, Sony Dwi Kunoro, ganda putra Markis Kido dan Herdiana Setiawan. Di bagian putri, Maria Fide dan pasangan ganda Liliana Natris dan Vita Marisa. ■ NET



Carmelo Anthony

JENNIFER KURNIAWAN

Siap Merit Dengan Irfan Bachdim

PARA cewek penggemar pesepakbola Irfan Bachdim harus siap-siap patuh hati. Pasalnya Jennifer Kurniawan, sang kekasih, menegaskan siap menikah dengan pesepakbola berwujud imut tersebut.

"Ya tentu kami akan menikah," tegas Jennifer usai menjadi bintang tamu program musik Dahsyat di Studio 1 RCTI Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (24/2).

Tapi, model *hot* berkewarganegaraan Jerman itu belum menentukan waktu yang tepat kapan menwujudkan keinginannya menikah dengan Irfan. "Saya nggak tahu kapan rencana itu akan dilaksanakan. Kami belum punya tanggal pastinya," jelas Jennifer.

Namun, Jennifer yakin pernikahannya dengan Irfan bukanlah sebatas angan-angan. "Pastinya rencana itu di kemudian hari akan diwujudkan," terang Jennifer yang baru dua minggu di Indonesia untuk berlibur.

Tidak hanya menikah, Jennifer juga menyimpan hasrat tinggal dan berkarier di Indonesia. Selain tetap menggeluti dunia model, Jennifer bersiap menambah ke dunia film.

"Saya benar-benar ingin menata karier di sini. Terutama untuk dunia *modeling* dan rencana untuk berkarier di dunia akting (film) dan sebagainya," ungkap dara Dara kelahiran Jerman itu.

Model berusia 24 tahun itu menambahkan, meski kedatangannya kali ini cuma untuk berlibur, dia juga sedang mempersiapkan kebutuhan pindah ke Indonesia.

"Beberapa tawaran (*job*) sudah ada, namun saya harus memastikan segala sesuatunya. Saya dan manajemen saya juga harus melihat *awarannya*," tuturnya.

Rencananya gadis berambut panjang ini akan ke Malang, Jawa Timur, untuk bertemu Irfan yang saat ini bermain di klub Persija Malang.

"Besok saya akan pergi ke Malang, untuk nonon dia berunding. Lalu ke Bali untuk berlibur. Maret baru balik," tandasnya. Divonis sang kekasih, Irfan lebih semangat pastinya. ■ BCG



Dewi Perssik & Nicky Tirta Nikah Siri?

Di tengah kasus cakar-cakaran dengan Julia Perez (Jupe), Dewi Perssik (Depe) dikabarkan mau menikah siri dengan pesinetron Nicky Tirta.

KABAR ini mencuat setelah Depe dan aktor ganteng Nicky Tirta memproklamkan hubungan asmara mereka, pekan lalu. Ditanya soal rumor kawin siri, Depe enggan komentar banyak. Dia hanya bilang, siap menikah untuk kali ketiga.

"Saya nggak mau ngomongin itu dulu. Yang penting dari awal saya sudah bilang, saya akan nikah. Saya sudah pasti menikah karena sudah fasih bergoyang," canda Depe saat ditemui usai diperiksa sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, Rabu (23/2), malam.

Soal menikah siri, bekas janda Saipul Jamil dan Aldy Taher ini juga irit bicara. Dia hanya menjelaskan, kalau nikah siri memang dibolehkan dalam agama Islam.

"Kalau saya menikah siri itu karena saya seorang Muslim. Jadi nikah siri itu siapapun berhak melakukan pernikahan secara siri," popamya.

Depe menjelaskan bahwa dirinya tengah mempersiapkan diri untuk

menikah. Bahkan ia rajin minum daun siri sebelum naik ke pelaminan.

"Sekarang saya lagi sering minum daun siri. Pokoknya nikah rock & roll," ujarnya kembali bercanda.

Terkait kasus cakar-cakaran dengan Jupe, Depe mengaku siap menghadapi segala tuntutan.

"Harus siap mental. Saya di sini korban. Kalau mau berdamai, kenapa nggak dari dulu. Berdamai di depan kamera untuk apa. Tapi di sini, berdamai setelah film sudah kelar. Bukan saya tidak mau, *di-pending* buat musyawarah mufakat karena nggak mau sebagai korban selanjutnya," celotehnya.

Di Polda Metro Jaya, bekas istri Saipul Jamil ini dicecar 21 pertanyaan. Dia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus perkelahian antara dirinya dengan Julia Perez.

"Ada 21 pertanyaan dengan tambahan-tambahan dari mereka. Tapi secara formal 21 pertanyaan," ujar Dewi. ■ BCG



CSL Blueberry

Han DroidPad **MI700** "pilih yang saya pilih"

Rp. 3.999rb

ad-teen Q292

Rp. 599rb

CSL Gareline: 021-5386522 | Website: www.csl-mobile.com

CSL FunClub

Laser Lipolysis

Teknologi tercanggih untuk penurunan berat badan

1 X terapi langsung langsing !!!

Garansi 100% Uang kembali

Satu satunya di Indonesia yang berani memberikan garansi 100% uang kembali bila tidak terbukti

* Jakarta Selatan: (021) 724.5939
* Jakarta Utara: (021) 6471.7452
www.nibelth@yahoo.com

Nibelth Clinic
Beauty & Perfect Concept
Beauty Clinic & Cosmetic Surgery



MAIA ESTIANTY Siksa Rambut

DEMI penampilan, Maia Estianty rela gonta-ganti model rambut. Dalam setahun, janda Ahmad Dhani ini bisa tiga kali merombak model rambutnya. Wamanyapun beragam, mulai warna biru, kuning, merah, hingga pink. Semua itu dilakoni agar terlihat beda dan tidak cepat bosan.

"Agar tampil beda, memang sering gonta-ganti, jarang warnanya normal. Dari warna biru, kuning, merah, pink, semua warna aku coba, apalagi kalau show. Rambut ini kalau hidup mungkin akan nukulin aku," kata Maia, saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu malam (23/2).

Sering berganti-ganti model rambut, ibu tiga anak ini mengaku tidak pernah mempunyai masalah serius dengan kesehatan rambutnya. "Kena bahan-bahan kimia, rambut pasti kering, bercabang, kucel, tidak mudah diatur. Tapi, karena perawatan yang tepat, rambut saya nggak ada masalah sampai sekarang," lanjut Maia.

Dikanya model rambut yang paling disukainya, wanita kelahiran Surabaya 35 tahun lalu itu menjawab, "Mau pendek cocok, mau panjang cocok. Buat saya, semuanya tetap terlihat cantik." ■ BCG